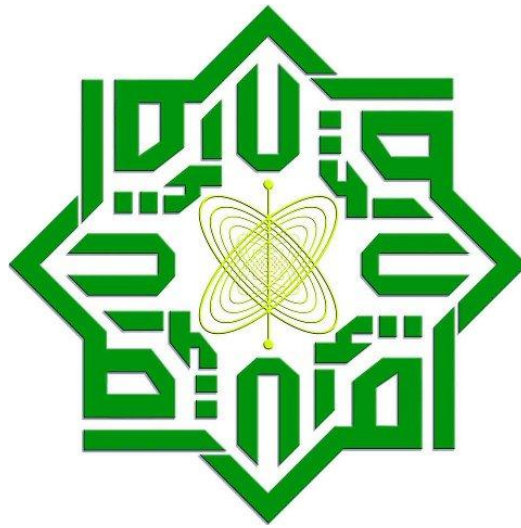


SKRIPSI

***PERANAN BAGIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER
DI KABUPATEN KARIMUN***



DISUSUN OLEH :

FRAN HARDY
10775000054

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

PERANAN BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER DI KABUPATEN KARIMUN

OLEH :

FRAN HARDY

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun pada Bagian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan kesetaraan gender terhadap perempuan di Kabupaten Karimun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Karimun pada Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Karimun. sedangkan manfaat yang diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai isu kesetaraan gender di Kabupaten Karimun. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sampel sebanyak empat orang dari jumlah populasi 16 orang. Penarikan sample dilakukan dengan menggunakan teknik sampling, yaitu teknik pengambilan sample secara sengaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender terhadap perempuan di Kabupaten Karimun yang di Laksanakan oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum berjalan dengan baik. Perencanaan kebijakan tentang peningkatan kesetaraan gender belum disahkan, terhambat oleh persetujuan pembiayaan untuk setiap perencanaan kebijakan yang telah disiapkan. Sementara program pemberdayaan perempuan di bidang peningkatan produktifitas ekonomi perempuan diketahui kurang pengawasan mengenai pengelolaan modal serta pengembangan usaha terhadap kelompok perempuan pelaku usaha rumahan. Sehingga, memberikan efek kemandirian bagi perempuan untuk meningkatkan perekonomian masih belum efektif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah SWT Yang dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Karimun.”** Shalawat dan Salam pada Nabi Muhammad SAW, untuk perjuangan ikhlas beliau meluruskan peradaban manusia yang terbangun dari “kebodohan” menjadi peradaban yang lebih baik.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ayahanda Muhammad Yusuf, S.Pd dan ibunda Yuslimah yang telah memberi didikan dan mengiringi penulis menemukan cahaya hidup, dan senantiasa mendo'akan keberhasilan dan kebahagiaan ananda. Dan Saudari-saudari ku yang terkasih dan tercinta Fini Kartika dan Tri Ardianingsih atas kasih sayang mereka serta pengertian yang telah mereka berikan. Semoga Allah melimpahkan kebahagiaan surga terhadap mereka di hari akhir kelak. Amin.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku rektor UIN SUSKA Riau
3. Bapak Mahendra Romus, M.Ec, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak pembantu Dekan I. II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku ketua jurusan yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan.
6. Bapak Afrizal, S.sos, M.Si selaku Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan.
7. Bapak Riki Hanri Malau, SE, MM selaku pembimbing dan dosen konsultasi dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan Ilmu, serta meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada Tim penguji skripsi. Atas kritrik, saran dan masukan yang telah diberikan.
9. Seluruh Dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan terutama Almarhum Bapak Nopri semoga jihad beliau dalam dunia pendidikan diterima ALLAH S.W.T dan menjadi pahala yang tak terputus kepada beliau.
10. Ibu Hj. Mitrayati, S.Sos, M.MP sebagai Ketua Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas informasi berkenaan dengan masalah penelitian ini.
11. Ibu Nurkhairani, S.Sos sebagai ketua Subbagian Pengembangan Organisasi Wanita atas informasi dan referensi yang telah diberikan.
12. Seluruh pegawai di Bagian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun.
13. Kepada Guntur Alamsyah, S.Sos, Edison Manulang, S.AP, Asril Ramadhan Siregar, S.AP, Deni Setiawan, S.AP. Serta semua sahabat, keluarga, dan hero

yang bersarang di Malaycamp dan Karimun House yang telah memotifasi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, “kalian semua selalau dihati”.

14. Semua pihak yang mungkin terlewatkan yang ikut memberikan motivasi, semangat dan dorongan yang tidak di sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa tulus dan ikhlas. Semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang setimpal yang menjadi amal saleh, Amin... ya rabbal alamin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang sudah penulis tuliskan dan susun ini masih banyak kekurangan. Meskipun penulis telah melakukan telaah terhadap berbagai pedoman untuk menaklukan tantangan penelitian dan penyusunan penulisan ini. Oleh karena itu saran dan kritikan yang membangun dari seluruh pembaca sangat penulis harapkan.

Pekanbaru, 07 Mei 2012

Penulis

FRAN HARDY
NIM.10775000054

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERNGESAHAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	5
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
I.4. Sistematika Penulisan.....	6

BAB II Landasan Teori

A. Pengertian Gender	10
B. Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.....	16
C. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.....	18
D. Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	25
E. Keadilan Gender Dalam Islam	31
F. Hipotesa	35
G. Variabel Penelitian	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian.....	36
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	36
3.3. Metode Pengumpulan Data	37
3.4. Populasi dan Sampel	38
3.5. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Profil Kabupaten Karimun	40
1. Wilayah	40
2. Daratan dan Perairan	40
3. Iklim	42
4. Penduduk.....	42

B. Sejarah Singkat Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65
a) Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pemberdayaan Perempuan.....	44
b) Susunan Organisasi Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45
c) Uraian Tugas Subbagian	46
d) Program Unggulan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	48

BAB V PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	49
1. Jabatan Responden	50
2. Jenis Kelamin Responden	51
B. Hasil Penelitian	52
1. Perencanaan Kebijakan	52
2. Ketentuan Pelaksanaan Kebijakan	54
3. Kendala Pelaksanaan Kebijakan Keseetaraan Gender di Kabupaten Karimun.....	55
4. Hal-hal Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan Peningkatan Kesetaraan Gender di Kabupaten Karimun	58
5. Program Pemberdayaan Perempuan Oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	60
C. Pembahasan.....	63

BAB VI KESIMPULAN dan SARAN.....	74
VI.i. Kesimpulan.....	74
VI.ii. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Perempuan adalah salah satu pembahasan hangat diperbincangkan didalam spektrum politik internasional. Ragam isu dan kajian berkaitan dengan perempuan terus mencuat di dalam segala bidang. Baik mengenai status perempuan dalam kajian sosial budaya, keikutsertaan perempuan dalam bidang pembangunan hingga mengenai persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki dalam administrasi negara dan penentuan kebijakan publik di suatu negara. Kajian-kajian tersebut juga dilakukan oleh beberapa kalangan feminis non-pemerintah yang berasal dari beberapa idiologi politik dengan tujuan memperjuangkan keadilan bagi perempuan untuk terjun ke sektor ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Untuk itu, PBB mengadakan kongres mengenai “*Women In Development*” pada tahun 1975 di Meksiko. Kongres tersebut diadakan untuk merencanakan strategi melibatkan perempuan dalam pembangunan untuk menjawab isu-isu ketidakadilan terhadap perempuan dalam pembangunan sejak pembangunan itu dilakukan. Kongres ini diadakan setelah pemerintah A.S mengumumkan *International Development Program* didalam rencana Bantuan Luar Negerinya. Secara jelas pemerintah A.S mencantumkan tentang bagaimana melibatkan perempuan dalam proses pembangunan Internasional. Pemerintah A.S menilai keterbelakangan perempuan di negara-negara berkembang disebabkan karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan.

Perempuan Dalam Pembangunan dibahas lebih lanjut oleh dewan PBB di Kopenhagen di tahun 1980, dengan menghasilkan cerminan nilai dan norma sebagai instrumen yang memungkinkan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diberi nama *Copenhagen Programme For Action* dengan fokus dukungan terhadap perempuan dalam pembangunan melalui peningkatan pendidikan, pelayanan, kesehatan dan bidang pertanian. Disinilah konvensi perempuan pertama kali diadopsi sebagai dokumen internasional oleh PBB dengan maksud agar alienasi dan diskriminasi terhadap perempuan dapat ditanggulangi secara efektif dan efisien dalam pembangunan yang berlangsung di negara-negara dunia ketiga melalui pemberdayaan laki-laki maupun perempuan untuk memiliki peran dan daya saing.

Indonesia adalah salah satu negara yang ikut meratifikasi *Copenhagen Programme For Action*. Keseriusan pemerintah Indonesia untuk menjalankan *Copenhagen Programme For Action* ditunjukkan dengan berlakunya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Tujuan dari INPRES R.I No. 9 Tahun 2000 tersebut adalah untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan dengan upaya mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kedalam seluruh proses pembangunan nasional.

Indonesia saat ini mengarahkan pembangunan yang lebih demokratis dengan langkah desentralisasi. Program pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat agar kesejahteraan masyarakat

dapat dirasakan seluas-luasnya keseluruhan masyarakat Indonesia. Pembangunan dengan asas desentralisasi merupakan sebuah relasi kekuasaan dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan batas-batas daerah masing-masing. Kemudian melalui relasi kekuasaan tersebut, pemerintah daerah memiliki keterlibatan besar dalam pembangunan dengan menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Maka dengan adanya keterlibatan daerah untuk menentukan kebijakan bagi daerahnya, diharapkan kepekaan pemerintah daerah menangani permasalahan-permasalahan perempuan di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan pada beberapa penelitian terhadap relasi gender, permasalahan yang merugikan serta menghambat perempuan untuk memainkan peran dalam ruang lingkup sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain, dinilai didorong oleh faktor sikap dan perilaku masyarakat terhadap perempuan. Sebagai contoh, pandangan masyarakat terhadap perempuan di Kabupaten Karimun masih banyak mengadopsi pandangan klasik terhadap laki-laki dan perempuan.

Pandangan yang masih sangat jelas terlihat adalah tentang pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Pembagian kerja gender tradisional (*gender base division of labour*) menempatkan pembagian kerja, perempuan di rumah (sektor domestik) dan laki-laki bekerja di luar rumah (sektor publik). Pembagian kerja tersebut menimbulkan prasangka yang akhirnya

berdampak pada kurangnya rasa saling menghargai antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Karimun. Hal tersebut memberikan dampak buruk bagi perempuan.

Masalah lain adalah masih banyak kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Karimun. Sat Reskrim Polres Karimun mencatat, telah terjadi 14 kasus trafficking sepanjang tahun 2008 hingga 2010, sementara kasus KDRT tercatat 28 kasus sepanjang tahun 2008-2010. Berdasarkan catatan kepolosian modus operandi *trafficking* yang terjadi di Kabupaten Karimun adalah *pertama* dengan berpura-pura sebagai penyalur tenaga kerja kemudian membujuk dan menjanjikan kepada korban pekerjaan dengan upah atau gaji besar, kemudian korban dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) untuk menguntungkan pelaku/kelompok tertentu.

Kedua mencari wanita yang keberadaan ekonominya kurang mampu juga dalam keadaan hamil dan menjanjikan pembayaran biaya persalinan, dengan tujuan setelah bayi lahir akan dirawat, namun kemudian bayi tersebut diperjual belikan oleh pelaku untuk menguntungkan diri sendiri/kelompok tertentu.

Berdasarkan pada laporan unit pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan. Terlampir 10 kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Karimun khususnya di Bagian Ibu kota Kabupaten Karimun.

Kemudian kasus kekerasan dalam rumah tangga juga ditunjukkan dalam modul sosialisasi penghapusan Kekersan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Karimun oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dengan jumlah kekerasan dalam rumah tangga berkisar 22 kasus. Selain itu dalam modul ini juga memaparkan kondisi obyektif perempuan di Kabupaten Karimun sebagai berikut :

- a. Perempuan masih berada pada kekuasaan budaya patriarki yang kuat
- b. Masih banyak jumlah perempuan yang berpendidikan rendah
- c. Perempuan masih mengalami diskriminasi dan beban ganda
- d. Perekonomian masih sangat bergantung pada suami

Dari kondisi dan kasus diatas menunjukkan bahwa penerapan pengarusutmaan gender untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Karimun masih belum optimal. Maka dapat dikatakan bahwa kapasitas dalam kelembagaan pelaksanaan PUG masih belum memadai.

Hampir disetiap sekretariat Kabupaten/Kota memiliki satu bagian yang berwenang untuk mengatasi permasalahan perempuan disetiap Kabupaten/Kota. Berdasarkan Keputusan Bupati Karimun No. 15 Tahun 2008 Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak juga berkewajiban untuk merumuskan perencanaan kebijakan sebagai pelaksana koordinasi pengendalian dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta secara langsung menjadi pelaksanaan teknis operasional dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Memberdayakan perempuan, merupakan sebuah salah satu strategi penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan diberlakukan karena perempuan dianggap kurang mampu untuk memainkan perannya dalam pembangunan. Tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan kualitas perempuan sehingga lebih mampu berdaya saing dalam segala sektor pembangunan.

Dilihat dari segi perilaku dan perkembangan masyarakat di Kabupaten Karimun. Program pemberdayaan perempuan belum cukup mampu memberikan hasil signifikan terhadap kualitas hidup perempuan di dalam sektor pembangunan. Sebagai contoh pengembangan usaha kecil yang dijalankan oleh perempuan belum menunjukkan peningkatan taraf hidup dan daya saing yang berkualitas di kalangan perempuan khususnya Kabupaten Karimun.

Hal ini dapat dibuktikan dengan peredaran barang produksi yang tersebar di pasaran. Hasil produksi perempuan masih berada pada perluasan edar yang sempit. Padahal, Kabupaten Karimun merupakan salah satu wilayah yang peredaran hasil produksinya beragam, baik dari dalam maupun luar negeri. Apalagi daerah ini merupakan daerah yang sangat berdekatan dengan dua negara serumpun yakni Malaysia dan Singapura. Seharusnya hasil produksi perempuan dapat tersebar luas ke dua negara tersebut, dan kemungkinan besar mampu diminati konsumen yang lebih besar. Dengan

dukungan faktor cita rasa yang tidak jauh berbeda karena didominasi oleh masyarakat melayu.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat analisis terhadap Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai upaya yang dijalankan oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan kesetaraan gender bagi kaum perempuan di Kabupaten Karimun. Pertimbangan lainnya adalah permasalahan kesetaraan gender merupakan bagian dari kegiatan yang harus diusahakan oleh pelaksana administrasi negara.

Administrasi negara memiliki makna secara luas adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang didalamnya terdapat kegiatan untuk melayani dan melindungi hak-hak publik yang ditangani oleh negara melalui kebijakan publik. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat penelitian dengan judul ***“Peran Bagian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Karimun”***.

I.2. Perumusan Masalah.

Pemerintah ditingkat kabupaten merupakan suatu perangkat yang dibentuk sebagai organisasi formal yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dalam melayani masyarakat ditingkat kabupaten dengan berbagai bidang dan fungsinya masing-masing yang ditentukan berdasarkan

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan INPRES No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan adalah merupakan tanggungjawab keseluruhan unsur pemerintahan baik di pusat maupun daerah maka rumusan masalah yang ditetapkan oleh penulis adalah :

“Bagaimana upaya Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan kesetaraan gender terhadap perempuan di Kabupaten Karimun?”

.

I.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

A. Tujuan Penelitian ini dilakukan :

Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Karimun pada Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Karimun.

B. Manfaat Penelitian :

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai isu kesetaraan gender dalam pembangunan di Kabupaten Karimun.
2. Sebagai landasan bagi penelitian dengan tema yang sama bagi peneliti berikutnya.
3. Sebagai sumber informasi mengenai isu kesetaraan gender.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian penulisan dalam laporan penelitian, yang saling berkaitan menghubungkan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi dalam enam (6) bab dengan sub-sub pokok antara lain :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan perihal penelitian seputar, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Memuat landasan teori yang dipakai dalam rangka membandingkan dan menginterpretasikan temuan penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Merupakan bagian yang berisikan tentang lokasi penelitian dan metode penelitian yang peneliti gunakan serta mengenai sumber dan jenis data serta metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis

Bab IV : Gambaran Umum lokasi Penelitian.

Merupakan gambaran secara umum tentang lokasi serta objek penelitian dilakukan.

Bab V : Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan mengenai hasil temuan yang didapat setelah penelitian dilakukan.

Bab VI : Kesimpulan dan Saran

Rangkuman dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang di ajukan oleh penulis mengenai permasalahan yang diangkat

BAB II

Landasan Teori

A. Otonomi Daerah

Dalam menyongsong pengelolaan daerah melalui otonomi daerah, pemerintah telah memberlakukan beberapa peraturan pemerintah dan keputusan presiden mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Pemberlakuan otonomi daerah secara mendasar adalah untuk memperluas pembangunan dengan menerapkan konteks pemberdayaan masyarakat agar tingkat partisipasi peran masyarakat semakin bertambah dengan tujuan menciptakan serta mendidik masyarakat untuk lebih mampu mengembangkan diri agar dapat lebih mandiri dalam mencapai membangun kekuatan ekonomi.

Wijaya (2005) menyebutkan *“Pelaksanaan otonomi daerah secara formal telah dirancang pada tanggal 01 januari 2001 dan otonomi daerah telah ikut mewarnai pada pengelolaan otonomi daerah. Isu otonomi daerah di identifikasikan dan dianalisis apakah berdampak pada pemerintahan daerah, tetapi perlu menentukan apakah pada pemerintah daerah, tetapi perlu menentukan isu strategis yang menjadi prioritas untuk segera dapat solusi pemecahan yang bersifat komprehensif. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi sistem pemerintahan”*. (HAW Wijaya, (2005) *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia*)

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* berarti hukum/peraturan. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintah, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Sedangkan, dalam literatur Belanda otonomi ‘berarti pemerintahan sendiri’ (*zelfregering*) yang oleh **Van Vollenhoven** dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri),

zelfuitvoering (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri), dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri). (Marius Agustinus Laki (2011), *Analisis Proses Penerapan Perhitungana dan Pelaporan Pajak Reklame Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makasar*)

Didalam **Undang-Undang No 32 Tahun 2004** Tentang Pemerintahan Daerah, **otonomi** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara yang dikatakan **daerah otonom** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berkaitan berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Tim Redaksi Nuansa Aulia (2006). *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Otonomi Daerah*)

Siswanto menyebutkan “pengertian otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Berdasarkan rumusan tersebut, dalam daerah otonom terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur (element) batas wilayah. Yaitu untu menetntukan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum, batasan daerah yang jelas juga dapat membedakan antar daerah satu dan yang lainnya.
2. Unsur (element) pemerintahan.
Eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legitimasi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri. Element

pemerintah daerah adalah Pemerintah daerah dan lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Unsur Masyarakat

Masyarakat sebagai element pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum, jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut mewarnai sistem pemerintahan daerah, mulai dari bentuk cara berpikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk partisipatif budaya masyarakat antara lain gotong royong, permusyawaratan, cara menyatakan pendapat dan pikiran yang menunjang pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan pemerintah. (Siswanto Sunarno (2006), *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*)

Dalam UU Pemda dikatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut **Kaho** dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Manusia pelaksanaanya harus baik. Pentingnya factor ini dikarenakan manusia merupakan pelaku utama dalam setiap kegiatan pemerintahan.
2. Keuangan harus cukup dan baik. Hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak ada membutuhkan biaya.

3. Organisasi dan manajemennya harus baik. Susunan dari satuan-satuan organisasi, beserta segenap pejabat, pembagian tugas serta hubungan antara aparat dalam rangka pencapaian organisasi harus berjalan baik.
4. Peralatannya harus cukup dan baik. Setiap benda atau alat yang dipakai guna memperlancar aktifitas pemerintah di daerah berupa peralatan yang baik, praktis, dan efisien. Keempat faktor tersebut diatas merupakan komponen yang saling melengkapi dan saling menunjang dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga apabila suatu daerah telah memiliki keempat factor tersebut, maka pelaksanaan kebijakan otonomi dapat dilaksanakan dengan baik.

Sedangkan untuk mengukur hasil dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam wujud ekonomi daerah, **Rindnelli dan Cheema** berpendapat bahwa hal tersebut paling tidak ada tiga hal pokok, antara lain:

1. Tercapainya tujuan kebijakan desentralisasi yang berwujud pelaksanaan otonomi daerah.
2. Meningkatnya kemampuan lembaga Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan, mobilitas sumber daya dan pelaksanaan.
3. Meningkatnya produktifitas, pendapatan daerah, pelayanan terhadap masyarakat dan peran serta aktif masyarakat melalui penyaluran inspirasi rakyat.

Ketiga hal pokok di atas merupakan indikator yang dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan atau hasil dari satu daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah. (Marius Agustinus Laki (2011), *Analisis Proses Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Reklame Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar*)

Terdapat dua cara penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom. *Pertama* : berbagai fungsi pemerintah diserahkan dirinci dalam produk hukum (PP No. 8 Tahun 1995). Cara ini dianut undang-undang pemerintahan daerah sebelum Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Dalam hal ini, pemerintah telah menyerahkan 19 urusan pemerintahan kepada daerah otonom sebagai realisasi dan/atau tambahan fungsi (urusan) pangkal yang tercantum dalam undang-undang pembentukan daerah otonom.

Kedua : yang dirinci merupakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kompetensi pemerintahan, disebut *open end arrangement* (PP No. 25 Tahun 2000). Sisa dari rincian fungsi pemerintah tersebut menjadi kompetensi daerah otonom. (HAW Wijaya. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*)

Dalam perjalanan reformasi Pemerintahan Indonesia dengan pembentukan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945. Telah lahir berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah diantaranya adalah :

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 22 Tahun 1984
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957
- d. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965
- e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
- f. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
- g. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Dari beberapa keterangan diatas, yang dikatakan dengan otonomi daerah adalah suatu wilayah hukum yang diberi hak dan wewenang untuk mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat masing-masing. Dengan tujuan untuk membangun dan mendidik masyarakat agar lebih mampu dan mandiri melalui campur tangan pemerintah daerah.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pemimpin daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah

- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Adapun kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah :

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Melestarikan lingkungan hidup
- l. Mengelola administrasi kependudukan
- m. Melestarikan nilai sosial budaya

- n. Membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Hak dan kewajiban daerah tersebut, di wujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang hendak di capai maka yang harus dilakukan pemerintah adalah :

1. Pemerintah wajib melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman, seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan
2. Di samping itu, diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi
3. Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (HAW Wijaya. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*)

B. Arti Gender

Kata **gender** dalam bahasa Indonesia adalah kata yang diadopsi dari bahasa Inggris. Secara terminologis, 'gender' bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Hilary M. Lips, 1993: 4).

Gender sering kali diartikan sama dengan sex. Namun kata sex dan gender memiliki makna yang berbeda meskipun pada dasarnya sama-sama memiliki makna perbedaan jenis kelamin. Kata sex adalah perbedaan yang terdapat antara laki-laki dan perempuan dengan dilihat melalui unsur biologis. Gender lebih dimaknai dengan perbedaan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh persepsi dan sistem sosial.

Mansour Fakih menyebutkan *meskipun gender sangat berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, tidak berarti gender adalah perbedaan yang ditimbulkan karena karakter biologis (sex) karena perbedaan biologis adalah perbedaan yang sejak lahir melekat dalam diri manusia dan tidak mungkin berubah melalui kondisi apapun. maka dari itu perbedaan gender lebih diamati melalui pandangan masyarakat tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi peran dan emosional gender itu sendiri* (Mansour Fakih 1999, Analisis Gender & Transformasi Sosial).

Oakley (1972) dalam *Sex, Gender and Society* menyebutkan *gender bukan merupakan perbedaan yang bersifat biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis adalah perbedaan yang berorientasi pada jenis kelamin dan bersifat permanen karena merupakan kodrat Tuhan dan sangat berbeda dengan gender. Gender merupakan behavioral differences (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial melalui kultural dan sosial* (Oakley (1972) dalam Mansour Fakih 1999, Analisis Gender & Transformasi Sosial, Hal 7).

Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Nasaruddin Umar, 1999: 34). Lebih

tegas lagi disebutkan dalam *Women's Studies Encyclopedia* bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Siti Musdah Mulia, 2004: 4).

Suzanne William, Janet Seed, dan Adelina Mwau dalam *The OXFAM Gender Training Manual* menjelaskan tentang pembentukan identitas diri manusia didalam kultur sosial masyarakat melalui analisa pendidikan tentang peran, perilaku, serta bagaimana berelasi yang didapat dari keluarga dengan menyebutkan bahwa “...Manusia Dilahirkan dan dididik sebagai bayi perempuan dan laki-laki... Mereka dididik tentang bagaimana cara bersikap, berperilaku, berperan dan melakukan pekerjaan yang sepantasnya sebagai perempuan dan laki-laki dewasa. Bagaimana berelasi diantara mereka, sikap-sikap yang dipelajari inilah yang pada akhirnya membentuk identitas diri dan peran gender mereka dalam masyarakat”. (Suzanne William dkk, dalam Riant Nugroho. 2008, *Gender dan Strategi Pengarusutamaanya di Indonesia*)

Asumsi ini cukup memotifasi pengembangan ide-ide pencapaian kesetaraan peran gender dalam pembangunan, dengan gambaran hak-hak peran yang dibawa oleh manusia sejak lahir melalui pendidikan yang mereka dapatkan dilingkungan masyarakat. Identitas karakter tadi kemudian menghadirkan perbedaan emosional antara manusia laki-laki dan perempuan terhadap situasi yang terjadi didalam masyarakat. Identitas dan emosional tersebut kemudian memberikan keinginan kepada manusia untuk berpeluang mengembangkan kualitas karakter mereka dengan berperan serta didalam tahapan pembangunan yang berlangsung dimasyarakat baik dibidang Ekonomi, Pendidikan, Politik dan lain-lain.

Berdasarkan kajian sosiologi, perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan dapat dibentuk melalui pendidikan yang didapat melalui pendidikan

disekolah dan juga pandangan umum oleh masyarakat serta keterlibatan orang tua dalam membesarkan anak-anaknya.

Perubahan peran dan status perempuan umumnya disebabkan oleh perkembangan masyarakat dan wilayah lingkungannya. Perubahan masyarakat tersebut dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perubahan dan budaya masyarakat. Dampak yang timbul karena perkembangan ekonomi dan perubahan sosial tersebut adalah adanya disintegrasi pembagian kerja Gender. Pola kerja produktif yang baru antar maupun lintas gender mengarah pada diskriminasi pembagian kerja antar pria-wanita. (P. Sajogyo. 1984. *Peran Wanita dalam Perkembangan Ekonomi*).

Peran dan kedudukan merupakan dua aspek penting dalam integrasi sosial. Karena peran dan kedudukan merupakan aspek timbal balik dalam mempengaruhi perilaku setiap individu. Melalui peran seseorang akan berada pada posisi dinamis didalam struktur sosial dan dengan kedudukan pada posisi dinamis tersebut seseorang akan lebih leluasa untuk memberi pengaruh dan memperluas perannya. Kedua aspek ini sangat dipengaruhi oleh potensi individu untuk mampu mengakses dan memanfaatkan peluang yang sesuai dengan potensi diri itu sendiri.

Isu-isu gender diperkirakan berkembang pertama kali di Inggris Di tahun 1960-an melalui penelitian terhadap perempuan. Perkembangan isu gender pada saat itu di pengaruhi oleh hasil penelitian terhadap perempuan yang dilakukan dengan dua tema pokok, *pertama* kekerasan fisik terhadap perempuan dan yang *kedua* kondisi kerja buruh perempuan. Kedua tema tersebut awalnya diteliti dengan melihat perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan dari unsur biologis serta pengamatan yang dilakukan terhadap sosial budaya seperti yang dilakukan oleh Robert Stoller pada tahun 1968.

Pada masa tersebut, isu-isu mengenai kekerasan dan ketidakadilan gender dianggap disebabkan oleh ciri fisik dari jenis kelamin yang dikaitkan dengan pandangan budaya patriaki yang berkembang dimasyarakat. Dimana, dalam pandangan budaya patriaki wanita hanya berhak untuk mengurus rumah tangga, serta melayani suami, sehingga peran wanita sulit untuk dikembangkan lebih luas karena hak-hak mereka terbatas oleh doktrin-doktrin tersebut.

Isu gender kemudian berkembang dengan adanya penelitian yang mengacu pada pola masyarakat industrial mengenai gerakan masyarakat ke arah kesetaraan. Hampir diseluruh negara di dunia kedua tema tersebut seakan-akan menjadi syair populer yang terus mengalir seiring kencangnya arus pembangunan ekonomi yang melekat pada para pemikir-pemikir gender sebagai akibat langsung dari usaha-usaha untuk mengintegrasikan perempuan ke dalam proyek pembangunan dengan memisahkan pencirian perbedaan manusia melalui sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari segi biologis.

Beberapa istilah yang berkaitan dengan pengamatan gender yang perlu dipahami adalah :

1. Prasangka Gender.

Prasangka gender adalah pandangan atau perilaku yang mengistimewakan suatu jenis kelamin atas jenis kelamin lain. Secara umum, ada pandangan atau sikap bahwa pria lebih mampu dan unggul dari pada wanita. Sehingga, menimbulkan pandangan mengenai pantas

atau tidak pantas bagi pria atau wanita dalam melakukan tugas-tugas tertentu.

2. Diskriminasi Gender.

Diskriminasi gender adalah perbedaan perlakuan, prioritas, fasilitas, hak dan kesempatan yang diberikan dengan prioritas gender karena ia perempuan dan karena ia laki-laki.

3. Ketimpangan gender.

Ketimpangan gender adanya kesenjangan antara kondisi normatif dengan kondisi objektif. Contoh kondisi normatif : kesempatan mengikuti pendidikan formal bagi pria dan wanita. Contoh kondisi objektif : semakin tinggi jenjang pendidikan formal, jumlah wanita yang bersekolah semakin sedikit dibanding pria.

4. Kepekaan gender

. Kepekaan gender adalah kemampuan mengidentifikasi ketimpangan gender dan berupaya mencari jalan keluarnya.

5. Kesadaran gender

Kesadaran gender adalah kemampuan melihat dan menyadari ketimpangan, terutama dalam hal pembagian kerja dan kekuasaan antara pria dan wanita

6. Pembagian kerja gender

Pembagian kerja gender adalah pola pembagian kerja yang diberikan oleh masyarakat kepada wanita dan pria berdasarkan ciri-ciri sosial yang diberikan keatas keduanya.

7. Analisis gender

Analisa gender adalah upaya untuk memahami struktur sosial, pola hubungan sosial keduanya, serta pengaruh atau manfaat kegiatan pembangunan terhadap pria dan wanita. Tidak hanya sekedar memahami wanita. (Wayan Sudarta, *Konsep Gender dan Pengarusutamaan gender*)

Dari beberapa literatur yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan gender adalah analisa mengenai perilaku manusia mengenai peran yang akan dilaksanakan didalam masyarakat melalui pendekatan analisa lingkungan, budaya, serta hubungan interaksi yang dilakukan oleh kelompok maupun individu dan agar aktualisasi peran tersebut tidak menimbulkan adanya ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan dalam berelasi. Selain dari itu gender juga merupakan suatu analisa untuk melakukan pembahasan mengenai bentuk diskriminasi yang timbul dari relasi antara laki-laki dan perempuan dalam aktualisasi peran.

Melalui budaya yang berkembang dalam dimasyarakat, manusia akan terdidik untuk bersikap serta berperan sebagai laki-laki dan perempuan dengan identitas emosional diri yang terbentuk untuk berelasi dalam masyarakat dalam bidang yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Maka, melalui analisa gender diharapkan dapat memberikan solusi tentang bagaimana sikap dan peran tersebut tidak memberikan dampak negatif dan diskriminasi terhadap perbedaan emosional gender.

C. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Pembangunan adalah sebuah istilah yang sangat populer dalam kehidupan bangsa Indonesia, seakan-akan merupakan energi yang memotivasi bangsa Indonesia untuk meraih keberhasilan dan kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan. Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat dalam bidang ekonomi.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai *“Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”*.

Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu *“suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”*.

Dari penjelasan diatas dapat dimaknai bahwa pembangunan adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai modernitas melalui rangkaian rencana dan usaha yang dilakukan secara sadar dalam membina bangsa untuk meraih perubahan yang lebih baik. Dengan demikian pembangunan tidak hanya berefek pada kemajuan ekonomi akan tetapi, juga berdampak pada sikap, perilaku, serta moral masyarakat.

Tangdilintin (1999) menjelaskan pembangunan sosial sebagai suatu paradigma, muncul dan ramai diperdebatkan sejak awal tahun 1990-an. Topik perdebatan tidak hanya terbatas pada substansinya, tetapi juga menyangkut terminologi yang dianggap lebih tepat untuk mewakili gagasan baru itu. Ada

*beberapa terminologi yang ditawarkan, antara lain Pembangunan Alternatif, Pembangunan Berbasis Rakyat, Pembangunan Partisipatoris. Isu sentral dari gagasan tersebut adalah mencari alternatif bagi pembangunan yang berfokus pertumbuhan, yang menempatkan uang sebagai yang paling pokok (capital centered development), berubah menjadi pembangunan sebagai proses yang manusiawi (people centered development). Kenyataan bahwa pembangunan yang sangat berfokus pertumbuhan memang telah berhasil dengan gemilang mewujudkan kemakmuran, tetapi gagal mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata, bahkan sebaliknya banyak membawa masalah yang sulit dicari pemecahannya (Dalam Aris Munandar. *Pembangunan Nasional, Keadilan Sosial, Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 2 No. 1, September 2002).*

Pembangunan dikatakan berhasil, manakala pertumbuhan ekonominya tinggi yang pada gilirannya akan memberikan efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberhasilan tersebut akan dirasakan oleh setiap anggota masyarakat. Kenyataan menunjukkan hal yang berbeda dari anggapan tersebut, karena keberhasilan pembangunan hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang, sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam angan dan harapan yang sampai berakhirnya masa Orde Baru (setelah 32 tahun berkuasa) masih menampilkan kesenjangan yang lebar. Hal ini dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, tahun 1993 mencapai 7,34% dengan PDB per kapita mencapai 919 dolar AS. Meskipun distribusi pendapatan sebagai indikator pemerataan untuk periode waktu yang sama belum ada angka pasti, tetapi jika melihat penguasaan ekonomi (omzet) 10 konglomerat yang menguasai sekitar 30% PDB atau 200 konglomerat yang menguasai 58% PDB, dapat dikatakan bahwa kesenjangan ekonomi di Indonesia sangat memprihatinkan (Edi Suharto, 1997).

Gardono (1993) menyebutkan, *meskipun kemakmuran ekonomi dapat dicapai, tetapi tanpa strategi quota atau keterwakilan sosial, keberhasilan program pembangunan tersebut tidak akan memperbaiki keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh sila kelima dari Pancasila. Bahkan, peristiwa yang terjadi belakangan, secara tragis telah menghancurkan kemakmuran yang telah dicapai tersebut dan mengembalikan Indonesia pada “titik nol” dalam program pembangunan.*

Setelah pembangunan dalam pemerintahan Indonesia mengarah kepada konteks demokratisasi melalui desentralisasi, pemerintah Indonesia menetapkan suatu kebijakan tentang pengarusutamaan gender yang terkonsep berdasarkan keputusan pemerintahan dunia tentang *Women In Development* yang berusaha untuk mensejajarkan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Sebagai salah satu negara yang ikut menyetujui hasil dari beberapa konferensi yang diadakan untuk mengatasi permasalahan perempuan dalam pembangunan oleh PBB. Indonesia telah mengesahkan kebijakan tentang *gender mainstreaming* dalam pembangunan yang dirangkum dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutmaan Gender Dalam Pembangunan.

Pengarusutamaan Gender adalah stragtegi untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ke dalam seluruh proses pembangunan nasional (Inpres No. 9 Tahun 2000).

SK menteri dalam negeri tentang pedoman pengarusutamaan gender disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan

keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Sk Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah No. 132 Tahun 2003).

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui perencanaan kebijakan dan program yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang pembangunan.

Pengarusutamaan gender merupakan sebuah relevansi yang bertujuan untuk menentukan kebijakan dengan lebih memperhatikan kesimbangan antara laki-laki dan perempuan melalui analisa gender dalam masyarakat agar terjadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mengenai peluang dan hak untuk berperan dalam pembangunan serta sebagai langkah yang dilakukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan selama proses pembangunan berlangsung. Pengarusutamaan Gender pula dapat dikatakan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi masalah perempuan dalam pembangunan.

Menurut Riant Nugroho (2008) inti dari pengarusutamaan gender adalah proses mengintegrasikan pertimbangan gender dalam jalannya pembangunan. pengarusutamaan gender dalam pemerintah berarti

mengintegrasikan gender sebagai analisis maupun produk pembangunan kedalam agenda organisasi dan lembaga pemerintahan diseluruh tingkatan, nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Secara operasional, pengarusutmaan gender merupakan upaya untuk memasukkan atau mengintegrasikan kebijakan gender ke dalam organisasi dan lembaga pelaksana dan penyelenggara di keempat tahapan manajemen pembangunan yang berkesinambungan yaitu organisasi dan lembaga perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi (Riant Nugroho 2008 Gender dan Adminstrasi Publik. Hal 95).

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), di Indonesia dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Kesadaran dari konsep kesetaraan gender dalam pembangunan sering kali dihadapkan dengan argumen bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam proses pembangunan hanyalah merupakan sesuatu yang bersifat ilusi oleh pandangan sebagian pihak. Alasan penilaian ini adalah peran perempuan dalam proses pembangunan tidak hanya dihambat oleh dominansi peran pria tetapi juga oleh pembagian waktu antara mengurus masalah rumah tangga dengan tanggungjawab pekerjaan sehingga akan meminimalisasikan gerak perempuan untuk berperan penuh dalam proses pembangunan.

Bagi pejuang perempuan, peran perempuan sangat dimungkinkan dalam proses pembangunan. Sehingga mereka terus aktif melakukan kajian-kajian terhadap budaya dan perilaku masyarakat dengan pengamatan yang

dikembangkan melalui konsep anatomis dan psikologis laki-laki dan perempuan serta aturan keagamaan terhadap budaya manusia. Pada intinya kajian-kajian analisis gender yang dilakukan oleh para kaum feminis adalah untuk menjauhkan perempuan dari kekerasan dan bentuk-bentuk diskriminasi serta mencapai kesetaraan peran gender dengan cara membuka peluang bagi perempuan untuk berperan dibidang politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian kajian-kajian tersebut menjadi aspirin pembentukan ide-ide untuk mencapai dinamika kehidupan sosial yang lebih adil.

Pengesahan pengarusutamaan gender oleh pemerintah berdasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, masih terdapat kesenjangan gender baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, maupun dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Melalui pengarusutamaan gender maka pemerintahan daerah dibebankan tanggungjawab ekstra untuk mengelola pembangunan di setiap daerah masing-masing.

Kemudian tanggungjawab pemerintah daerah juga diatur dalam Pasal 42 (3) Jo. pasal 98 (3) UU No. 22 tahun 1999 tentang jaminan penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis yang harus dilaksanakan, baik oleh kepala daerah maupun kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakannya. Hal ini dituangkan dalam pengambilan sumpah jabatan yang dijadikan sebagai amanat pimpinan daerah dan desa.

Dengan demikian konsep pengarusutamaan gender dalam pembangunan dapat memiliki beberapa makna diantaranya adalah :

1. Sebagai strategi yang bertujuan untuk mengoptimalisasikan keseimbangan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.
2. Sebagai gerakan untuk mencapai relasi seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Maka dengan demikian pengarusutamaan gender diberlakukan dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia untuk berperan, berpartisipasi dalam pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dari pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Wayan Sudarta menyebutkan “*peran gender adalah peran yang tidak ditentukan oleh jenis kelamin yang bersifat kodrati. Peran gender merupakan peran yang tentukan norma dan nilai sosial budaya dalam masyarakat tertentu dan dapat berubah karena pengaruh kemajuan pendidikan, teknologi, ekonomi, dan lain. Ada tiga jenis peran gender sangat dikenal dalam pengintegrasian gender didalam pembangunan. Yakni, peran produktif, reproduktif dan sosial. Pengertian dari masing-masing peran ini sebagai berikut :*

- 1) *Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang (pria atau wanita), menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Peran ini sering pula disebut dengan peran di sektor publik.*
- 2) *Peran reproduktif adalah peran yang dijalankan oleh seseorang (pria atau wanita) untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga, menyetrika, membersihkan rumah, dan lain-lain. Peran reproduktif ini disebut juga peran di sektor domestik.*

- 3) *Peran sosial adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang (pria atau wanita) untuk berpartisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong-royong dalam menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama* (Wayan Sudarta, Konsep Gender dan Pengarusutamaan Gender).

D. Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan.

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris.

Dalam konsep pembangunan nasional kata pemberdayaan perempuan berkaitan dengan konsep pemerintah mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Pemberdayaan terhadap perempuan dilakukan agar perempuan lebih mampu mengembangkan potensi dirinya untuk berperan dalam pembangunan hal ini dikarenakan perempuan dianggap kurang mampu untuk meningkatkan kepekaan diri secara pribadi maupun kelompok (organisasi) dengan tujuan agar pembangunan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang produktif, maju, mandiri, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dapat dicapai.

Pemberdayaan merupakan strategi untuk memberlakukan individu atau kelompok dalam masyarakat agar memiliki kemampuan bereksplorasi terhadap situasi dan kondisi yang terjadi didalam masyarakat itu sendiri dengan cara mengembangkan ide-ide yang dimiliki oleh individu dan kelompok, sehingga

ide-ide tersebut dapat terlaksana atau singkatnya pemberdayaan merupakan strategi yang digunakan untuk mengembangkan diri manusia agar lebih berdaya atau berkemampuan.

Menurut A.Usmara “*pemberdayaan adalah salah satu strategi untuk memperbaiki sumber daya manusia dengan pemberian tanggungjawab dan kewenangan terhadap mereka yang nantinya diharapkan dapat memungkinkan mereka mencapai kinerja yang lebih tinggi di era yang selalu berubah*” (A. Usmara. 2002. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*).

Dari pandangan Usmara diatas pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara membebani tanggungjawab dengan pemberian wewenang agar manusia memiliki tingkatan kinerja yang lebih tinggi dari kemampuannya tersebut. Pemberdayaan diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan.

Menurut noe etal (1994) dalam A. Usmara (2002 : 123) *pemberdayaan adalah merupakan pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerja untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan*.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya

membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.

kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. (Sumodiningrat, Gunawan, 2002). Selanjutnya Sumadiningrat menyebutkan dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input),

serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya

dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Maka melalui pemberdayaan diharapkan masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek dalam pembangunan melainkan masyarakat harus menjadi subjek yang ikut serta menjalankan pembangunan tersebut. Berdasarkan konsep tersebut maka pemberdayaan harus memiliki perencanaan matang dengan didasari kearah mana pemberdayaan tersebut dilakukan. Kemudian masyarakat harus diikutsertakan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya misalkan dengan cara pembentukan kelompok agar kemampuan tersebut dapat dikembangkan.

Dari strategi pemberdayaan. Masyarakat, diharuskan untuk mandiri dengan kemampuan dalam suatu bidang agar pembangunan tidak hanya terbentuk sebagai sebuah konsep yang hanya menjadi beban pemerintah daerah maupun pusat. Selain itu peningkatan peran serta masyarakat juga diperlukan agar pengembangan pembangunan dapat dialokasikan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara adil dan meluas keseluruhan aspek yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pada otonomi daerah karena dua alasan yakni : **(1)** amanat konstitusi, dan **(2)** pelaksanaan kewenangan mengatur dan mengurus oleh pemerintah daerah.

E. Keadilan Gender dalam Islam

Perkembangan pemikiran mengenai gender telah merambah luas kedalam seluruh aspek masyarakat. Pemikiran ini bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat dunia yang lebih baik dan lebih adil antara laki-laki dan perempuan bahkan pemikiran-pemikiran tersebut telah menyentuh berbagai konsep agama paling tidak memberikan paksaan bagi para agamawan untuk mengevaluasi tafsiran terhadap posisi perempuan yang ada selama ini. Secara khusus penulis mengangkat permasalahan yang selama ini diangkat oleh kaum feminis terhadap agama islam mengenai posisi perempuan dalam struktur masyarakat sekarang dan mendatang.

Islam pada dasarnya adalah agama yang memiliki konsep keadilan, dengan panduan-panduan prinsip berdasarkan Al-Quran dan Hadits dalam berbagai bidang seperti Ekonomi, Politik, Kultural baik terhadap laki-laki dan perempuan. Islam adalah agama yang mengakui perbedaan antar sesama manusia baik jenis kelamin, ras, pendapat, dan bahkan karakter individual manusia itu sendiri.

Henri Shalahudin (2010) Menyebutkan “Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil 'alamin*, bukan untuk membanding-bandingkan antara laki-laki dan perempuan. Ajaran Islam bukan disusun berdasarkan jenis kelamin, sehingga tafsir al-Qur'an pun tidak pernah ditulis berdasarkan hal ini. Maka jika corak tafsir feminis yang mendasarkan metodenya pada kritik sejarah sebagai tren baru dalam metode tafsir al-Qur'an, otomatis akan banyak menyisakan pertanyaan yang berjubel: Sejauh manakah keabsahan metode ini digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an? Apakah terbatas pada ayat-ayat yang dipandang merugikan perempuan, dan tidak pada laki-laki? Ataukah metode kritik sejarah ini juga bisa digunakan untuk menafsirkan semua ayat-ayat al-Qur'an, baik yang terkait dengan tauhid, ibadah, hukum-hukum yang terkait dengan individu dan sosial, baik yang bersifat hukum kriminal maupun kekeluargaan, akhlak, kisah-kisah umat terdahulu, makanan, minuman, pakaian, serta bisakah juga diterapkan untuk mengkaji ayat-ayat yang bersifat

muḥkamÉt dan *mutashÉbihÉt*, baik itu ayat-ayat yang lafadznya berindikasi *qaḏ'i-Ḍanni*, *muḏlaq-muqayyad*, *khÉs-'Ém* dsb?! Ataukah metode kritik sejarah baru digunakan untuk menafsirkan sebagian ayat dalam rangka menolak sebagian ajaran-ajaran Islam tertentu yang tidak sejalan dengan paham humanisme dan pandangan-pandangan hidup Barat-Kristen kontemporer?"

Paham liberalisme Barat pada dasarnya berpijak pada prinsip kebebasan mutlak dan tak terkendali dalam pemikiran, agama, keyakinan, keimanan, bicara, pers dan politik (*an absolute and unrestrained freedom of thought, religion, conscience, creed, speech, press, and politics*). Sehingga pada gilirannya akan membawa dampak yang mengikis habis peran agama dalam kehidupan pribadi dan sosial. Sebab dampak terbesar dari liberalisme adalah (a) penghapusan hak Tuhan dan semua bentuk kekuasaan yang berasal dari Tuhan; (b) menjauhkan agama dari kehidupan publik dan memindahkannya ke ruang privat dalam keyakinan seseorang; (c) pengabaian mutlak terhadap agama Kristen dan gereja selaku institusi publik, legal dan sosial. (*the abolition of the Divine right and of every kind of authority derived from God; the relegation of religion from the public life into the private domain of one's individual conscience; the absolute ignoring of Christianity and the Church as public, legal, and social institutions*).

Inilah hakekat gerakan pembaharuan intelektual di Eropa pada abad 17 dan 18 (*enlightenment, aufklarung, renaissance* dan Revolusi Perancis) yang membentuk pandangan hidup (*worldview*) baru masyarakat Barat yang sekular dan melahirkan pemikir-pemikir yang agnostik terhadap agama. Sarjana-sarjana Barat abad 18 menganggap agama sebagai suatu ilusi dan penyimpangan intelektual.

Selanjutnya Nurdin menyebutkan "sejarah kelam Barat dalam menempatkan posisi perempuan yang dilatarbelakangi oleh teks Bibel sehingga membangkitkan teologi "kemarahan" di kalangan aktivis perempuan. Pengetahuan terhadap hal-hal yang mendasar seperti ini seharusnya menjadi rujukan bagi para pemikir, sarjana dan akademisi muslim sebelum berinteraksi dengan peradaban Barat lebih lanjut.

Isu-isu syariah yang dipropagandakan kalangan liberal, seperti masalah batasan aurat dan hak waris tidak luput dari pemahaman yang salah tentang makna tekstual dan kontekstual. Ayat-ayat al-Qur'an tidak bisa didekati secara dikotomis seperti ini. Sebab yang dikatakan tekstual juga mengandung kontekstual dan memerlukan pemaknaan yang lebih luas dari sekedar keduanya. Sebagai contoh satu kata dalam bahasa Arab bisa mencakup makna hingga puluhan, misalnya kata *naḌirah* bisa berarti melihat, menunggu, menanti, menanggukkan dsb. Namun dalam QS. Al-Qiyamah: 23 misalnya, kenapa kata ini tidak boleh dimaknai selain melihat? Ini berarti bahwa secara etimologis pun, lafadz dalam ayat al-Qur'an sudah tercakup pengertian kontekstual. (Henri Shalahudin (2010), *Paham Kesetaraan Gender Dalam Studi Islam*)

Agar tafsiran gender dalam Islam dicerna secara benar maka adalah dengan mengenal jenis-jenis dalilnya dulu karena didalam Al-Quran terdapat dua jenis dalil, yang *pertama* adalah dalil yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat atau tidak dapat ditafsirkan lebih dari satu pengertian, jenis dalil ini disebut dengan dalil *Qath'iy (qath'iyatul dalalah)*. Ayat-ayat seperti ini berjumlah lebih sedikit karena menyangkut hal-hal yang sangat prinsip. Dan yang *Kedua* adalah dalil yang bisa ditafsirkan dengan berbagai pendapat dan bisa dengan berbagai konsep terapan ilmu yang berkembang seperti ilmu sosial tergantung dalam permasalahan apa kajian akan dilakukan. Dalil ini disebut dengan dalil *dhanny (dhanniyul dalalah)*. Agar pemahaman mengenai gender dalam islam tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh islam maka tafsiran posisi perempuan dalam islam harus dihubungkan dengan ilmu fikih yang merupakan landasan ilmu mengenai perilaku keseharian ummat islam.

Muhammad Haekal Hakim (2010) Menyebutkan “jika kesetaraan dipahami secara proporsional dengan berdasar pada sumber Islam, maka tidak akan didapatkan makna ataupun tujuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Meskipun akan ada perbedaan, maka perbedaan tersebut adalah fitrah masing-masing, yang menegaskan bahwa antara yang satu dan yang lainnya ada saling keterkaitan dan saling melengkapi.

Kesetaraan yang ada dalam Islam adalah kesetaraan yang menunjukkan keserasian antara laki-laki dan perempuan. Keserasian yang dibangun di atas syari'at, bersandar pada asas kemitraan, bukan perlawanan, serta kerjasama yang tidak mengandung persaingan”. (Muhammad Haekal Hakim (2010), *Konsep Keserasian Gender Dalam Al-Quran*)

Al-quran menyebutkan salah satu tujuan penciptaan manusia adalah : “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Megenal*” (Al-hijr)

Ayat tersebut mempertegas bahwa Islam tidak membatasi laki-laki dan perempuan untuk berelasi didalam masyarakat semua muslimin baik laki-laki dan perempuan diberikan kebebasan dengan aturan adil untuk melakukan interaksi dengan sumber aturan dari Al-Quran dan beberapa tafsiran Hadits. Dari gambaran dalil diatas perbedaan laki-laki dan perempuan adalah ketakwaannya terhadap Allah S.W.T. Islam terhadap ummatnya secara adil terutama dalam melakukan relasi seperti yang disebutkan diatas.

Ibnu katsir mengenai ayat ini mengatakan, “semua manusia berada dalam kemuliaan, namun, masing-masing saling memiliki kelebihan antara yang satu dan yang lain dalam urusan-urusan agama, yaitu ta’at kepada Allah dan mengikuti rasulallah saw. Oleh karena itu, Allah melarang manusia untuk saling menghina dan saling menjelekkan, sebagai peringatan bahwa mereka sama-sama manusia.” (Ibnu Katsir Dalam Muhammad Haekal) Ayat lain yang menegaskan hal ini berbunyi :

”Maka tuhan memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) : “sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki dan perempuan (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.” (An-Nahl : 97)

Kata yang menjadi point pada ayat diatas adalah kata **amal**. Arti kata **amal** pada ayat tersebut diatas merujuk pada pengertian yang dipahami secara etimologis/istilah yaitu pekerjaan yang baik yang dapat mendatangkan pahala seperti sedekah, dan lain-lain. Didalam islam seluruh perbuatan manusia akan dinilai sebagai ibadah apabila dilakukan dengan niat karena ALLAH bahkan termasuk juga perbuatan-perbuatan yang ringan seperti menyingkirkan batu yang menghalangi jalan kepinggir jalan, mengunjungi orang yang sakit,

bertegur sapa dengan tetangga dan lain-lain bahkan bekerja, makan, minum dan mandi pun akan menjadi ibadah apabila diniatkan karena ALLAH. Penjelasan tersebut adalah gambaran umum tentang keadilan Islam kepada seluruh pengikutnya tanpa membedakan warna kulit, ras, dan juga jenis kelamin.

Dilihat dari dimensi sosialnya, Islam adalah satu-satunya agama yang mutlak berbeda dengan semua agama-agama maupun seluruh peradaban di seluruh dunia. Karena Islam mendefinisikan agama sebagai masalah kehidupan itu itu sendiri. Akibatnya, apapun yang merupakan aktifitas seorang muslim, wajiblah aktifitas tersebut sesuai dengan tuntunan Islam. Hal ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena dalam Islam, Islam adalah ruang dan waktu itu sendiri, sehingga Islam relevan untuk seluruh ruang dan waktu. Begitupula halnya dalam kehidupan bermasyarakat. Islam menjamin hak-hak asasi laki-laki dan perempuan, karena hal tersebut merupakan teori sosial Islam. Dalam teori sosial Islam, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam masyarakat adalah hubungan yang alamiah, yang tidak mungkin bisa dihindari. Berkaitan dengan ini, peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tentu sangat vital, mengingat keduanya adalah makhluk sosial yang tentunya bergelut dalam masyarakat dan merupakan khalifah Allah di bumi. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 30 :

"Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu

orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Muhammad Haekal Hakim : 2010)

Meskipun demikian, hak-hak antara laki-laki dan perempuan memiliki batas tertentu didalam islam. Terutama hak-hak sosial yakni tentang peran antar laki-laki dan perempuan. Namun hal tersebut bukan merupakan alasan bahwa ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam relasi sosialnya. Karena islam telah mengatur seluruhnya dengan cara yang ma'ruf. Seperti yang dijelaskan Allah dalam Al-quran yang berbunyi :

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari isterinya. Dan Allah maha perkasa lagi Maha Bijaksana". (Al-Baqarah : 228)

Ayat diatas merupakan salah satu ayat yang dijadikan landasan pikiran secara teori oleh kalangan feminis untuk memaknai ketidakadilan gender dalam Islam. Kalangan feminis menyebutkan "Bahwa posisi laki-laki dilebihkan menjadi pemimpin bagi wanita, yang mungkin dapat dibenarkan dalam situasi perang dan kondisi tempat pria dalam masyarakat (**public domain**) dan wanita dalam rumah tangga (**domestic domain**). Pengandaian superioritas ini telah lama dirasakan sudah merupakan kendala bagi perkembangan wanita. Bahkan menjadi legitimasi untuk eksploitasi wanita yang menjadi "second sex" dalam pengabdian untuk suami, anak, keluarga dan sarana penerus generasi untuk negara dan untuk penerus jenis".

Muhammad Tha'mah Al-Qudhah menyebutkan bahwa ada beberapa persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam :

1. Nilai ketakwaanya.
2. Keduanya diciptakan dari diri yang satu dan melewati fase-fase pertumbuhan yang serupa. Al-qurqan : Annisa' Ayat 1 yang berbunyi :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

3. Sama-sama menjadi mulia karena iman dan budi pekerti yang luhur. Menjadi hina karena kekafiran dan penyimpangan. Al-Quran surah As-Syam : 7-10 yang berbunyi :

“Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”

4. Sama berhak memperoleh kesempatan beribadah, memperoleh ampunan dan pahala yang besar. (al-ahzab : 35)
5. Sama-sama bermartabat kemanusiaan. (at-takwir : 8-9)
6. Sama-sama berhak dalam berkesempatan menuntut ilmu. (HR Ibnu Majah)
7. Sama menerima hukuman. (al-maidah :38, an-nur : 2)
8. Sama-sama dalam penilaian iman dan amal. (al-imran : 195)

9. Sama-sama saling menolong, sama-sama mengerjakan *amar ma'ruf nahi munkar*. (at-taubah : 97)
10. Berhak mendapatkan nafkah dari orang tua bila ia seorang anak, dan berhak mendapat nafakah bila ia seorang istri
11. Sama berpeluang mengerjakan amal saleh (berkarier) dalam semua bidang kehidupan seperti politik, pendidikan, budaya ekonomi, hukum, kesehatan dan lain-lain. (an-nahl : 97). (Muhammad Tha'mah Al-Qhudhah dalam Muhammad Koderi)

F. Hipotesa.

Berdasarkan latarbelakang masalah dan beberapa teori yang dikemukakan diduga pembangunan di Kabupaten Karimun melalui kesetaraan gender belum mampu meningkatkan kesetaraan gender karena masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dengan mengacu pada karena usaha mandiri perempuan masih terbatas. terutama dari segi perkembangan skema pemikiran perempuan mengenai kemandirian dalam pencapaian kesejahteraan yang bersetara gender. Dan masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam beberapa kasus antara lain, Kekerasan dalam rumah tangga, Traficking, dan pelecehan seksual.

G. Variabel Penelitian.

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2005 : 38). Maka yang dijadikan variabel dalam penelitian ini berdasarkan pada SK Menti

dalam Negri Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutmaan Gender Dalam Pembangunan di Dearah No. 132 Tahun 2003. Dimana disebutkan bahwa pengarusutmaan gender adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program, proyek, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Agar penelitian tidak terjadi penyimpangan serta untuk menugukur permasalahan dari permasalahan utama sebagai bahan pemikiran yang diangkat maka penulis menentukan beberapa indikator dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Program
4. evaluasi

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang diambil oleh penulis maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karimun dengan melibatkan Sekretariat Daerah Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun.

3.2. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari bagian pemberdayaan perempuan melalui wawancara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesertaan perempuan dalam pembangunan serta mengenai hambatan yang terdapat dalam pengembangan pengarusutamaan gender.

2. Data Sekunder

Data yang bersumber dari pihak ketiga secara tidak langsung, dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian dilakukan dan dari beberapa pihak terkait dalam permasalahan ini, serta melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan referensi lain yang berkaitan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Agar data dan informasi yang bersangkutan dengan penelitian dapat diperoleh, penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih jelas.
2. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden. Dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Studi Pustaka adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah teori dan informasi yang erat hubungannya dengan materi peneliti. Hal ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, majalah dan sumber-sumber lainnya.

3.4. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan Objek Penelitian (Suharsimi, Arikunto, 2002 : 108). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Karimun sebanyak 16 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi, Arikunto, 2002 : 109). Dari beberapa populasi tersebut penulis mengambil beberapa dari kelompok populasi yang diteliti sebagai sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mempunyai tujuan tertentu saja dengan alasan

sampel mampu mengusai masalah yang diteliti. Selanjutnya Suharsimi Arikunto mengatakan cara menentukan sampel adalah bila subyek kurang dari 100 orang lebih baik diambil seluruhnya dan apabila lebih dari 100 dapat diambil 10-15% atau 20-25%.

Maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah pegawai dan pimpinan yang terdapat pada keseluruhan populasi yakni 16 orang.

3.5. Teknik Analisa Data

Setelah data-data terkumpul, data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu analisa dengan cara menguraikan data yang terkumpul dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian melakukan interpretasi terhadap hasil yang relevan untuk dijadikan kesimpulan. Teknik ini dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis.

BAB IV

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Profil Kab Karimun

1. Wilayah

Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 53 tahun 1999. Pada awal terbentuknya Kabupaten Karimun terdiri dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Karimun, Moro dan Kundur. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 16 tahun 2001, maka wilayah Kabupaten karimun dimekarkan menjadi 8 kecamatan, dan akhirnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 10 tahun 2004 dimekarkan lagi menjadi 9 kecamatan yaitu Kecamatan Karimun, Meral, Tebing, Kundur Kota, Kundur Utara, Kundur Barat, Durai, Moro dan Buru. Sementara jumlah kelurahan sebanyak 22 Kelurahan dan 32 Desa dengna 327 RW dan 945 RT.

Berdasarkan luasan wilayahnya, Kabupaten Karimun merupakan Daerah kepulauan yang mempunyai luas 7.984 kilometer persegi yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.524 kilometer persegi dan wilayah perairan seluas 6.460 kilometer persegi. Secara astronomis terletak antara 0 derajat 35 detik lintang utara sampai dengan 1 derajat 10 detik Lintang Utara dan 1103 derajat 30 detik Bujur Timur sampai dengan 104 derajat Bujur Timur.

Kabupaten Karimun Berbatasan Langsung Dengan:

1. Utara : Selat Malaka dan Singapura
2. Selatan : Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir
3. Barat : Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan.

4. Timur : Kota Batam dan Kepulauan Riau.

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Karimun memiliki 245 pulau. 3 diantaranya merupakan pulau-pulau yang besar, yakni pulau Karimun, Pulau Kundur dan Pulau Sugi. Dari 245 pulau tersebut dimana wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari 73 pulau berpenghuni, 172 pulau tidak berpenghuni, 200 pulau bernama dan 45 pulau tidak bernama.

2. Daratan dan Perairan

Kabupaten Karimun merupakan wilayah yang relative datar dan landai dengan ketinggian 2-500 meter diatas permukaan laut. Sebagian wilayah Kabupaten Karimun merupakan pegunungan/ perbukitan dengan kemiringan 40 dan ketinggian 20-500 meter diatas permukaan laut, yang terdapat di Utara Pulau Karimun. Disamping itu pada beberapa pulau diwilayah Kabupaten karimun terdapat rawa-rawa. Kemudian, dilihat dari keberadaan potensi wilayahnya maka wilayah laut Kabupaten Karimun merupakan perairan yang subur karena sebagian wilayahnya berada pada Selat Malaka.

3. Iklim

Sebagaimana daerah Tropis lainnya, Kabupaten Karimun hanya mengenal dua musim yaitu musim Kemarau dan musim Hujan. Temperatur udara rata-rata mencapai 27.2 derjat, kelembatan udara 85 persen. Musim kemaru pada umumnya terjadi di Kabupaten karimun sepanjang bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Sedangkan bulan Januari mengalami curah hujan rata-rata pertahun mencapai 238.6 milimeter. Kecepatan angin maksimum terjadi pada musim hujan dengan rata-rata kecepatan perhari 4 knot.

4. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kairmun per April 2006 diperkirakan mencapai 205.483 jiwa terdiri dari 105.484 jiwa laki-laki dan perempuan cenderung stabil selama 3 tahun terakhir. Yaitu berkisar 51 persen dan 49 persen. (Sumber : Pemkab Karimun)

B. Sejarah Singkat Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Karimun.

Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun merupakan suatu lembaga daerah yang dibentuk sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Karimun dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Karimun. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdiri pada tahun 2004 berdasarkan pada Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun yang telah disahkan pada 14 Januari 2004. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun berada dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati yang berperan melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan perdagangan orang, pencegahan diskriminasi perempuan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta mendorong kesetaraan gender di Kabupaten Karimun.

Pada tahun 2004 hingga 2006, Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan organisasi pemerintahan yang berdiri sendiri di

Kabupaten Karimun. Kemudian dirubah menjadi bagian yang tergabung dalam Asisten Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.

Berikut ini adalah nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor dan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun :

1. **Reny Yusneli**, Mejabat sebagai Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Januari 2004 hingga Januari 2006.
2. **Tias Winoroyekti**, Menjabat sebagai Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten karimun sementara. Menggantikan kepala kantor yang lama pada Januari hingga Juni 2006.
3. **Ir. Supinah, M.Si**, Menjabat sebagai Kepala Kantor dan Juga Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun pada Juni 2006 hingga 2011.
4. **Hj. Mitrayati, S.sos,MMP**, Kepala Bagian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun saat ini.

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun berubah menjadi Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun dimasa kepemimpinan Ir. Supinah.

a) Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupatean Karimun.

Berdasarkan surat keputusan bupati no. 54 tahun 2004 tugas pokok Bagian pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan perencanaan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan koordinasi pengendalian dibidang pemberdayaan perempuan.

2. Pelaksanaan teknis operasional dibidang pemberdayaan perempuan.
3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.
4. Melaksanakan kegiatan lain dibidang pemberdayaan perempuan sesuai dengan kebijakan Bupati.

Fungsi Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Adalah Sebagai Berikut :

1. Unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Karimun di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Sebagai asisten pemerintah Kabupaten Karimun di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Merumuskan kebijakan
4. Perencanaan
5. Pengendalian/Pembinaan/Pengarahan dan Bimbingan
6. Penelitian dan Pengakajian
7. Pelaporan

b) Susunan Organisasi Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun.

Susunan Organisasi Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

1. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kepala Subbagian Pengembangan Organisasi Wanita
3. Kepala Subbagian Kesetaraan Peningkatan Aktivitas Perempuan
4. Kepala Subbagian Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak

c) Uraian Tugas Subbagian.

1. Subbagian Pengembangan Organisasi Wanita

- a. Melakukan perumusan rencana teknis operasional pelaksanaan penataan dan pengembangan organisasi wanita.
- b. Melaksanakan penataan, pemberdayaan, dan pengembangan organisasi wanita secara berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Melakukan persiapan saran dan prasarana yang menunjang pelaksanaan dan penataan dan pembinaan organisasi wanita.
- d. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan penataan dan pengembangan organisasi wanita.
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan, pembinaan, dan pengembangan organisasi wanita.
- f. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh kepala bagian.

2. Subbagian Kesetaraan Dan Peningkatan Aktivitas Perempuan

- a. Mempersiapkan penyusunan rencana petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan pembinaan kesetaraan dan peningkatan aktivitas perempuan.
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan kesetaraan.
- c. Melaksanakan pembinaan peningkatan aktivitas perempuan
- d. Melakukan persiapan sarana dan prasarana pembinaan kesetaraan dan peningkatan aktivitas perempuan.

- e. Melakukan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kesetaraan dan peningkatan aktivitas perempuan.
 - f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka kegiatan pembinaan kesetaraan dan peningkatan aktivitas perempuan daerah.
 - g. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh kepala bagian.
3. Subbagian Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Perlindungan Anak.
- a. Memepersiapkan penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga (PKK) dan perlindungan anak.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga (PKK)
 - c. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
 - d. Melakukan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
 - f. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh kepala bagian.

d) Program Unggulan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
 - 1) Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) se – desa / Kelurahan
 - 2) Pembinaan Terhadap Perempuan Keluarga Kurang Mampu dan Suku Asli dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok di Kabupaten Karimun.
 - 3) Gerakan Hari Anak Nasional (HAN) di Kabupaten Karimun
2. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Pembangunan
 - 1) Sosialisasi Bahaya Pornografi dan Trafficking
 - 2) Pembinaan Tugas Pokok dan Fungsi PKK bagi Pengurus PKK Kecamatan dan Perlombaan PKK Kecamatan seKabupaten Karimun

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Penelitian ini, dilakukan dengan dua metode dalam pengumpulan data. Metode pertama dilakukan dengan cara observasi dengan cara pelibatan secara langsung dalam subjek yang akan diteliti. Pengumpulan data selanjutnya dilakukan dengan metode wawancara.

Observasi dilakukan penulis pada tahun 2010 bertepatan dengan masa PKL (Praktek Kerja Lapangan) pada bulan Juni hingga Agustus 2010. Observasi atau pengamatan dilakukan dengan mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPP dan PA sebagai upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karimun. Selain itu penulis juga melakukan wawancara langsung pada Bagian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2011 untuk menguatkan dugaan penulis dari hasil pengamatan tentang kebijakan yang akan maupun yang telah dibuat oleh BPP dan PA di Kabupaten Karimun.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil responden dari jabatan yang terdapat didalam Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Jenis Kelamin Responden

Tabel V.2 Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Responden	Posentase
1	Laki-laki	4	25%
2	Perempuan	12	75%
	Jumlah	16	100%

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2010

Tabel diatas merupakan penjelasan mengenai jumlah jenis kelamin responden yang ada dibagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Karimun. Dimana Jumlah responden berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dari jumlah responden berjenis kelamin perempuan. Jumlah responden berjenis kelamin laki-laki adalah 4 orang sementara jumlah responden berjenis kelamin perempuan adalah 12 orang dengan jumlah keseluruhan adalah 16 orang.

2. Jabatan Responden.

Jabatan responden dalam penelitian ini dijabarkan dalam tabel V.1 berikut ini.

Tabel V.1. Jabatan Responden

No	Jabatan	Jumlah Responden	Porsentase
1	Kepala Bagian	1	6,25%
2	Kepala Subbaagian POW	1	6,25%
3	Kepala Subbagian KPAP	1	6,25%
4	Kepala Subbagian PKK dan PA	1	6,25%
5	Staf Subbagian POW	4	25%
6	Staf Subbagian KPAP	4	25%
7	Staf Subbagian PKK dan PA	4	25%
	Jumlah	16	100%

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2010

Ket :

POW : Pengembangan Organisasi Wanita

KPAP : Kesetaraan Peningkatan Aktivitas Perempuan

PKK dan PA : Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak

Pada tabel V.1. tergambar bahwa jumlah keseluruhan pegawai pada Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan jabatan adalah 16 orang pegawai. Terdiri dari 1 orang sebagai kepala bagian, 1 orang kepala subbagian POW, 1 orang kepala subbagian KPAP, 1 orang Kepala Subbagian KPAP. Masing-masing subbagian memiliki 4 orang staf.

B. Hasil Penelitian

1. Perencanaan Kebijakan

Dalam peraturan menteri dalam negeri no 15 tahun 2008 disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijaksanaan program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, rencana strategis SKPD, dan rencana kerja SKPD melalui analisis gender. Kebijakan tersebut merupakan landasan bagi pemerintah setiap daerah untuk melaksanakan pembangunan yang bersetara gender.

Dalam wawancara terhadap ketua subbagian Pengembangan Organisasi Wanita pada 15 desember 2011, beliau menyatakan bahwa : *“Gender merupakan sesuatu yang baru di Kabupaten Karimun. Hal yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi SKPD melalui pembentukan kelompok kerja PUG yang merangkum instansi terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran perempuan dan mengurangi diskriminasi terhadap perempuan di Kabupaten Karimun”*. (Hasil wawancara pada 15 Desember 2011).

Hasil yang didapat mengenai perencanaan kebijakan tentang pengarusutamaan gender di Kabupaten Karimun melalui wawancara tersebut diatas adalah :

- a. BPP dan PA mengadakan sosialisasi SKPD melalui pembentukan kelompok kerja PUG (Pengarusutmaan Gender).
- b. Merangkum seluruh instansi yang terkait dalam peningkatan peran dan pengurangan diskriminasi terhadap perempuan.

Sementara itu ketua Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun menyatakan bahwa :

“Kebijakan apapun tanpa didukung dana adalah nol, bagian pemberdayaan perempuan telah melakukan beberapa program dalam pemberdayaan perempuan. Dalam peningkatan kesetaraan gender Bagian Pemberdayaan Perempuan telah membuat beberapa perencanaan namun Program tersebut belum disahkan oleh pemerintah Kabupaten Karimun. Sehingga pada tahun 2011 tidak ada apapun yang dapat dilakukan karena belum ada dukungan dana, maka Program tersebut belum dapat dilaksanakan. Program yang telah direncanakan oleh BPP dan PA untuk meningkatkan Kesetaraan gender salah satunya adalah membentuk POKJA untuk melakukan Analisis gender. Tetapi insya allah program tersebut “akan ada” pada tahun 2012 untuk peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Karimun”. (Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2011)

Dari pernyataan ketua BPP dan PA diatas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dilakukan sebagai bentuk kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Karimun oleh BPP dan PA adalah :

- a. Membuat program pemberdayaan perempuan.
- b. Membentuk POKJA untuk melakukan analisis gender.

Untuk lebih menguatkan beberapa pernyataan diatas penulis mengakses beberapa informasi melalui karyawan yang menjadi anggota BPP dan PA mengenai program kegiatan yang telah dilakukan oleh BPP dan PA, hasil yang didapat adalah diketahui bahwa BPP dan PA membentuk kelompok kerja tentang gerakan sayang ibu di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun. Program ini memiliki target pencapaian sebagai bentuk kegiatan yang mempermudah mengetahui permasalahan bagi ibu dan anak.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi mengenai gerakan sayang ibu. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan kesetaraan gender melalui peningkatan kualitas hidup perempuan.

2. Ketentuan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Hasil wawancara kepada ketua subbagian Pengembangan Organisasi Wanita pada 15 desember 2011, didapat bahwa kegiatan yang telah direncanakan tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang kemudian dilanjutkan dalam jangka lima tahun sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Karimun. dalam hal ini beliau menyebutkan :

“Kegiatan analisis gender akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun anggaran dan kemudian di berlakukan dalam jangka waktu lima tahun sesuai dengan Visi dan Misa Kabupaten Karimun”.

Sementara itu menurut informasi yang didapat dari pegawai kantor BPP dan PA, diketahui bahwa setiap kegiatan dan perencanaan kegiatan pengarusutamaan gender oleh BPP dan PA dilakukan dalam jangka waktu :

- a. Lima tahun sesuai dengan Nota Kesepakatan bersama setiap pemerintahan daerah Kepulauan Riau baik Kabupaten atau Kota yang di Kepulauan Riau dalam pencapaian target MDGs (*Millenium Developement Goals*) Tahun 2015
- b. Lima tahun sesuai dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Karimun

Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa jangka waktu yang digunakan untuk menjalankan kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Karimun adalah :

- a. Lima tahun sesuai dengan pencapaian Nota Kesepakatan pencapaian target MDGs 2015

b. Lima tahun sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Karimun

3. Kendala Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Karimun

Mengutip dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap ketua BPP dan PA diketahui bahwa kebijakan yang direncanakan oleh BPP dan PA dalam meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Karimun disebabkan oleh faktor pembiayaan sehingga kebijakan yang telah dibuat dan direncanakan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Namun beliau menyebutkan perencanaan untuk peningkatan pengarusutamaan gender akan diusahakan pada tahun 2015 meskipun belum mendapat gambaran yang jelas mengenai hal tersebut.

Sementara itu Ketua Subbagian Pengembangan Organisasi Wanita menyebutkan bahwa :

“Penyebab terkendalanya peningkatan pengarusutamaan gender di Kabupten Karimun disebabkan oleh budaya melayu yang melekat di masyarakat. Sehingga dukungan terhadap kaum perempuan untuk ikut dalam program pembangunan masih sangat terbatas, pada umumnya masyarakat melayu selalu menganggap bahwa perempuan lebih baik dirumah dari pada bekerja diluar rumah dibidang pekerjaan yang lebih sesuai dikerjakan oleh laki-laki.

Dari kedua hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor penghambat yang mencolok dalam pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Karimun adalah *pertama*, minimnya dana yang tersedia untuk melaksanakan rencana program pengarusutmaan gender. *Kedua*, cara

pandang klasik masyarakat Karimun dalam memandang peran perempuan yang dipengaruhi oleh budaya melayu yang melekat di masyarakat Karimun.

Sementara itu dalam wawancara dengan Kepala subbagian Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak menyebutkan *“sulitnya kesetaraan gender dapat ditingkatkan di Kabupaten Karimun disebabkan oleh faktor budaya dan agama. Dari segi faktor budaya, secara umum masyarakat karimun masih mempraktekkan budaya-budaya dimana perempuan hanya boleh bekerja disektor reproduktif, seperti memasak, melayani suami, menjaga anak, dan segala urusan rumah tangga. Dan segi faktor agama, masyarakat karimun masih terbebani dengan anggapan bahwa laki-laki lebih tinggi derajat dari pada perempuan. Maka dari itu, perempuan harus bersikap tunduk kepada laki-laki. Selain itu masyarakat juga memahami bahwa islam telah mengajarkan bahwa perempuan hanya boleh bekerja dirumah”*.

Dari penjelasan yang didapat dari wawancara kepada Kepala Subbagian Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak diketahui bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPP dan PA untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Karimun disebabkan oleh ajaran Islam yang banyak dianut oleh masyarakat Karimun. Dimana masyarakat meyakini bahwa Islam melarang perempuan untuk bekerja diluar rumah. Sehingga kesempatan bagi perempuan untuk berperan dalam pembangunan terbatas. Sementara itu pegawai BPP dan PA menyebutkan bahwa, kesetaraan gender di Kabupaten

Karimun terkendala oleh faktor minimnya pembiayaan dan kurangnya pemahaman gender dalam masyarakat Karimun.

Dari seluruh sumber data, diketahui kendala yang dihadapi oleh BPP dan PA dalam meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Karimun adalah :

- 1) Minimnya pembiayaan untuk melaksanakan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Karimun
- 2) Anggapan budaya melayu bahwa perempuan lebih baik melakukan pekerjaan didalam rumah
- 3) Pemahaman ajaran Islam yang dipahami oleh masyarakat Karimun
- 4) Kurangnya pemahaman tentang gender didalam masyarakat Karimun

4. Hal yang dilakukan BPP dan PA Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Program atau Kebijakan Bersetara Gender.

Untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi oleh BPP dan PA dalam peningkatan kesetaraan gender dalam rangka penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten adalah :

- a. Setiap tahun BPP dan PA telah memprogramkan usulan dana yang berkaitan dengan program atau kegiatan yang berwawasan gender
- b. BPP dan PA melakukan penyusunan program berwawasan gender untuk masyarakat dengan mengadakan sosialisasi, seminar, dan pelatihan untuk memberikan pemahaman wawasan gender bagi masyarakat

Dari beberapa sumber diatas dapat disimpulkan bahwa untuk lebih mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Karimun, BPP dan PA telah merencanakan pembentukan kelompok kerja untuk analisis gender, melakukan sosialisasi SKPD dengan merangkum seluruh instansi yang terkait dalam peningkatan peran dan pengurangan diskriminasi terhadap perempuan, serta membuat beberapa program dibidang pemberdayaan perempuan.

Dari seluruh data dan informasi yang didapatkan, informasi yang terangkum adalah sebagai berikut :

1. BPP dan PA telah merencanakan program untuk peningkatan kesetaraan gender diantaranya adalah, membentuk POKJA PUG (kelompok kerja pengarusutmaan gender) dengan merangkum seluruh instansi yang berkaitan dengan peningkatan peran perempuan dan pengurangan diskriminasi terhadap perempuan, serta membuat beberapa program untuk pemberdayaan perempuan
2. Program tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun anggaran dan diberlakukan sesuai dengan VISI dan MISI Kabupaten Karimun
3. Program tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada INPRES RI No. 9 tentang pengarusutamaan gender dan Nota kesepakatan bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota di kepulauan riau mengenai strategi MDGs
4. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pendanaan dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai gender

5. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Untuk Berperan dalam Pembangunan Oleh BPP dan PA

Pengarusutamaan gender merupakan upaya untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan menerapkan strategi untuk mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Untuk meningkatkan *gender Mainstreaming* salah satunya adalah dengan melakukan proses pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan gagasan pembangunan yang ditekankan pada pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dengan memperhatikan kebutuhan kaum perempuan selama kondisi perempuan masih terpuruk akibat ketidakadilan gender. Alasan pentingnya hal tersebut dilakukan adalah agar perempuan lebih mandiri dan lebih mampu untuk bersaing dengan mengembangkan diri diseluruh sektor pembangunan.

Melaui wawancara dengan Kasubbag PKK dan PA pada tanggal 15 Desember 2011 didapat bahwa, *“Program pemberdayaan perempuan diberlakukan karena adanya indikasi bahwa ketimpangan dan ketidak adilan gender disebabkan oleh lemahnya posisi perempuan untuk berperan dalam masyarakat melalui proses pembangunan. Untuk saat ini program pemberdayaan perempuan yang telah dijalankan oleh BPP dan PA adalah dengan membentuk kelompok perempuan pelaku usaha rumahan serta menjalankan kegiatan komunikasi, edukasi, dan informasi tentang kesehatan ibu dan anak”*.

Dari wawancara diatas didapat bahwa program pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan oleh BPP dan PA untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Karimun adalah :

1. Melakukan pembentukan kelompok perempuan pelaku usaha rumahan.
2. Melakukan kegiatan Komunikasi, Edukasi dan Informasi, tentang kesehatan Ibu dan Anak.

Berkenaan dengan perihal diatas, dalam wawancara kepada Ketua Subbag Pengembangan Organisasi Wanita, beliau menambahkan bahwa

“Kelompok perempuan pelaku usaha rumahan telah dijalankan di Desa Pangke Kecamatan Meral sebagai desa percontohon untuk pengembangan program kelompok perempuan pelaku usaha rumahan. Sementara kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi tentang kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu kegiatan yang merupakan wujud dari gerakan sayang ibu.”

Sementara itu menurut seorang karyawan BPP dan PA yang berada dibawah pimpinan Kasubbag Kesetaraan dan Peningkatan Aktivitas Perempuan Menyebutkan *“Program pembentukan kelompok perempuan pelaku usaha rumahan tersebut telah diikuti oleh 20 anggota. Kegiatan tersebut telah dimulai pada tahun 2008 yang diawali dengan mengadakan seminar dan pelatihan kewirausahaan untuk perempuan. Program tersebut merupakan program kegiatan yang berlandaskan pada kebijakan yang*

dikeluarkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan mengenai Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan”.

Untuk lebih memperkuat data dan informasi, penulis menelusuri catatan program kegiatan yang tersedia di kantor BPP dan PA dengan hasil penemuan mengenai program-program bagian pemberdayaan perempuan dalam memberdayakan perempuan sebagai berikut :

- a. Membentuk POKJA (kelompok kerja) Gerakan Sayang Ibu disetiap Kecamatan sebagai bentuk kegiatan yang mempermudah untuk mengetahui permasalahan bagi Ibu dan Anak. Dalam hal tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah pelaksanaan K.I.E (Kominkasi Informasi Edukasi) tentang Gerakan Sayang Ibu (GSI).
- b. Pelatihan Perempuan Calon Pelaku Usaha Rumahan di Kabupaten Karimun dengan prioritas capaian kerja untuk meningkatkan jiwa wirausaha bagi pelaku usaha rumahan terutama perempuan.
- c. Pembentukan kelompok usaha rumahan khusus perempuan didesa pangke Kecamatan Meral sebagai desa percontohan.

Sementara untuk kegiatan lain yang dilakukan oleh BPP dan PA setiap tahun, yang penulis dapatkan melalui obesrvasi pada akhir tahun 2011 adalah Melakukan kegiatan Peringatan Hari Ibu dengan mengadakan perlombaan olahraga khusus untuk ibu-ibu bagi instansi dan lembaga pemerintahan di Kabupaten Karimun.

C. Pembahasan

Pengarusutamaan Gender adalah strategi untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. (Inpres No. 9 Tahun 2000)

Kesadaran dari konsep kesetaraan gender dalam pembangunan sering kali dihadapkan dengan argumen bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam proses pembangunan hanyalah merupakan sesuatu yang bersifat ilusi oleh pandangan sebagian pihak. Alasannya adalah peran perempuan dalam proses pembangunan tidak hanya dihambat oleh dominansi peran pria tetapi juga oleh pembagian waktu antara mengurus masalah rumah tangga dengan tanggungjawab pekerjaan sehingga akan meminimalisasikan gerak perempuan untuk berperan penuh dalam proses pembangunan.

Melalui sistem pembangunan yang bersifat desentralisasi dengan pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri diharapkan konsep kesetaraan gender dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal terhadap target pembangunan. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 disebutkan. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijaksanaan program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), rencana SKPD melalui analisis gender.

Kemudian dalam pemerintah daerah ditingkat Kabupaten/Kota, Bupati dan Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender skala Kabupaten/Kota. Bupati dan Walikota menetapkan Badan/Kantor/Dinas yang membidangi tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender.

Kebijakan tersebut merupakan landasan bagi setiap pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang bersetara gender. Berkenaan dengan hal tersebut, putusan bupati Karimun dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun. Badan/Kantor/Dinas yang membidangi tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Karimun adalah Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara didalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun disebutkan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan asisten pemerintahan yang bertugas melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan anak. Tugas Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah merumuskan perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi, dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dengan demikian, maka Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhak untuk menjalankan wewenang dalam merencanakan

kebijakan mengenai peningkatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Karimun. Dari seluruh data dan informasi yang bersumber dari wawancara dan observasi yang penulis dapatkan bahwa dari segi perencanaan kebijakan, Bagian Pemberdayaan Perempuan telah merencanakan beberapa kebijakan dan program untuk mensukseskan kesetaraan gender di Kabupaten Karimun. Beberapa perencanaan kebijakan dan program yang telah dibuat oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Karimun antara lain adalah :

1. Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) untuk melakukan analisis gender di Kabupaten Karimun.
2. Merangkum seluruh instansi yang terkait dalam peningkatan peran dan pengurangan diskriminasi terhadap perempuan dengan mengadakan sosialisasi SKPD
3. Membentuk POKJA gerakan sayang ibu di setiap Kecamatan.
4. Membuat perencanaan program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karimun

Beberapa kebijakan diatas belum dapat dilaksanakan oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal tersebut disebabkan oleh belum disahkannya rencana kebijakan yang dipengaruhi minimnya pembiayaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun. sehingga, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender masih tertunda.

Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak juga menyebutkan bahwa kesetaraan gender di Kabupaten Karimun masih belum

tercapai sepenuhnya. Hal tersebut dapat melihat melalui jumlah perempuan yang ikut dalam pemerintahan di kursi legislatif masih berjumlah terlalu sedikit yakni hanya berjumlah dua orang. Dengan demikian keterwakilan suara perempuan mengenai permasalahan-permasalahan gender masih mengalami ketimpangan.

Akan tetapi, agar penyusunan perencanaan kebijakan program untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Karimun tetap dapat berlangsung, BPP dan PA telah mengupayakan beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menyusun usulan dana kepada pemerintah Kabupaten Karimun yang berkaitan dengan program berwawasan gender serta mengadakan sosialisasi SKPD dengan merangkul seluruh instansi yang berkaitan dengan peningkatan peran perempuan dan pengurangan diskriminasi terhadap perempuan di Kabupaten Karimun.

Selain dari masalah minimnya pembiayaan. BPP dan PA juga menyebutkan, faktor lain yang menjadi kendala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Karimun. yakni kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender yang disebabkan oleh faktor budaya dan agama. Dari segi faktor budaya pengembangan peran perempuan sangat sulit dilakukan karena masyarakat masih menilai bahwa perempuan lebih diharuskan untuk melakukan pekerjaan rumahan seperti, melayani suami, memasak, dan menjaga anak.

Pandangan masyarakat tersebut didorong kuat oleh pandangan agama dalam hal ini adalah agama Islam. Karena budaya yang melekat erat dalam Masyarakat Karimun adalah budaya Melayu yang dominan dengan ajaran Islam itu sendiri. Dimana masyarakat beranggapan bahwa Islam melarang perempuan tidak boleh bekerja diluar rumah, tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki.

Dari permasalahan diatas dapat diketahui ada dua faktor yang saling mempengaruhi pemikiran masyarakat didalam permasalahan gender di Kabupaten Karimun. Yaitu Faktor Budaya dan Agama. Tataan budaya di Kabupaten Karimun dibentuk oleh masyarakat Melayu yang sangat erat dengan ajaran-ajaran Islam. Dari beberapa pendapat dan pandangan aktivis muslim, Islam tidak melarang laki-laki dan perempuan untuk memainkan peran dalam masyarakat. Meskipun ada batasan untuk perempuan dalam memainkan perannya. Batasannya adalah perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dalam masyarakatnya, terkecuali menjadi pemimpin rumah tangga, dan menjadi pemimpin diantara mereka. Maka dengan demikian peranan perempuan dalam pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender dapat dirubah, jika masyarakat mengetahui ajaran Islam yang mempengaruhi budaya dan tataan masyarakat itu sendiri.

Kedua permasalahan diatas merupakan situasi yang masih sangat sering terjadi dari pengamatan penulis. Terutama, dalam komunikasi pergaulan remaja di Kabupaten Karimun. Semestinya, kebijakan program analisis gender tersebut harus mendapat dukungan penuh dari lembaga legislatif di Kabupaten

Karimun, misalkan dari segi pembiayaan seperti yang diharapkan oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Agar beberapa permasalahan diatas dapat dipahami, serta jawaban mengenai cara untuk mengatasinya dapat dipecahkan agar penerapan pengarusutmaan gender dapat dilaksanakan lebih baik dan lebih luas dari segala aspek yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Karimun. Dalam hal ini, penulis mengetahui Bagian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak belum cukup kuat untuk mengorbitkan talentanya dibidang kesetaraan gender.

Saat ini BPP dan PA masih terus melakukan beberapa program pemberdayaan perempuan. Diantaranya adalah dengan melakukan pembentukan kelompok perempuan pelaku usaha rumahan dan melakukan kegiatan komunikasi, edukasi, dan informasi mengenai kesehatan ibu dan anak yang merupakan perwujudan dari gerakan sayang ibu. Namun kegiatan yang paling menonjol dari program kegiatan yang dilakukan adalah pembentukan kelompok perempuan pelaku usaha rumahan di Desa Panke Kecamatan Meral sebagai desa percontohan.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara memberikan bantuan modal bagi seluruh anggota kelompok usaha mikro di Desa Pangke. Bantuan modal tersebut diberikan dengan prioritas bahwa, anggota yang melakukan pinjaman modal usaha telah memiliki usaha rumahan untuk dikembangkan. Pinjaman tersebut kemudian dikembalikan dengan metode angsuran kepada bendahara yang ditunjuk dan disepakati anggota kelompok usaha rumahan. Angsuran pinjaman dikembalikan perbulan dengan jumlah 10 persen dari hasil usaha.

Anggota berhak mendapatkan pinjaman usaha secara begiliran dengan jangka waktu 1 bulan dari urutan setiap peminjam. Dengan ketentuan pinjaman modal usaha telah dilunasi.

Kegiatan tersebut cukup mampu mendorong perempuan khususnya di Desa Pangke untuk menggerakkan usaha mereka. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah anggot mencapai 20 orang. Kegiatan tersebut mulai dilakukan pada tahun 2008. Diawali dengan melakukan seminar dan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan pelaku usaha di Kabupaten Karimun yang diikuti oleh 40 orang peserta dari 9 kecamatan. Untuk mensukseskan kegiatan ini BPP dan PA bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karimun serta Bank Mandiri dan PT. Bank Riau Cabang Karimun sebagai sumber biaya modal.

Namun fakta yang didapat dari observasi penulis dengan mengikuti kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meninjau perkembangan usaha rumahan. Terdapat beberapa permasalahan yang dilaporkan oleh bendahara kelompok usaha rumahan. Diantaranya adalah :

- a. Keterlambatan pengembalian angsuran pinjaman modal oleh beberapa anggota kelompok usaha rumahan sehingga sisa modal pinjaman yang ditentukan tidak mencukupi.
- b. Terdapat beberapa anggota yang melakukan pinjaman lebih dari satu kali sebelum angsuran pinjamannya dilunasi.
- c. Pemberian pinjaman modal dilakukan tidak secara berurutan seperti yang telah ditentukan oleh BPP dan PA.

Dari beberapa permasalahan diatas pergerakan kelompok usaha rumahan di Desa Pangke mengalami hambatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi mereka. Karena, beberapa anggota dari kelompok usaha rumahan sulit untuk menambah kebutuhan financial sebagai modal pengembangan usaha mereka. Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya ketegasan kontrol yang dilakukan oleh bendahara kelompok perempuan pelaku usaha rumahan dalam memberikan pinjaman usaha kepada kelompok.

Selain itu, kekuatan perempuan pelaku usaha rumahan dibidang pemasaran masih cukup lemah. Dari segi pemasaran hasil produksi mislanya, Pemasaran produksi perempuan pelaku usaha rumahan masih terlalu sempit. Hasil produksi anggota perempuan pelaku usaha rumahan hanya mampu dipasarkan sebatas wilayah keberadaan usaha tersebut. Sehingga usaha yang dijalankan masih menuntungkan.

Faktor lainnya adalah kurangnya kreatifitas perempuan untuk melakukan modifikasi hasil produksi usaha rumahan mereka serta pemasaran hasil produksi usaha masih terlalu sempit. Usaha kecil dan menengah mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan (Jafar Hafsah, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*). Beberapa aspek yang mungkin perlu di tanggapi mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi perempuan dalam berwirausaha. Diantaranya adalah :

- a) Mengakses informasi untuk mengembangkan usaha.

Setiawati, mengatakan bahwa perempuan perlu mengembangkan kapasitas serta potensinya dengan lebih “melek” terhadap segala informasi dan juga teknologi yang setiap saat terus berubah, dengan melek informasi dan teknologi diharapkan perempuan dapat memacu karirnya (Setiawati, 2008, pada dialog dengan tema Menjadi Perempuan yang Revolusioner, www.muhammadiyah.online)

- b) Kesiapan mental.

Christina Andhika berpendapat, kelemahan perempuan dalam berbisnis adalah sebagai berikut :

1. Terlalu banyak pikiran

Ini sepertinya merupakan permasalahan dasar setiap perempuan. Dedikasinya yang besar pada keluarga membuat para perempuan, khususnya ibu rumah tangga, memiliki banyak pikiran ketika memutuskan untuk memulai kegiatan wirausahanya. "Banyak perempuan yang berpikir tentang meninggalkan anak-anak untuk bekerja, atau tidak bisa mengurus suami, atau hal lainnya. Padahal dengan menjadi wirausaha semua hal bisa diselesaikan dengan baik, dan waktu yang dimiliki lebih fleksibel dibanding pekerja kantor," tambah Tika.

2. Empati berlebihan

Sifat dasar perempuan yang satu ini sebenarnya lebih mirip seperti bumerang dalam berbisnis. Di satu sisi, sifat empati ini bisa membuat para perempuan peka terhadap berbagai kondisi di sekitarnya. Tak jarang berbagai ide wirausaha justru hadir dari keprihatinan ini, misalnya usaha untuk mengolah limbah kain, limbah plastik, kepedulian terhadap anak-anak yang kurang mampu, sampai memberdayakan potensi para perempuan di sekitar rumahnya untuk meningkatkan taraf hidup.

Namun, di sisi lain, sifat empati ini kadang tumbuh berlebihan pada diri perempuan. Sifat ini tak jarang membuat perempuan tidak berpikir rasional dan justru mengutamakan sisi emosionalnya. Sehingga perempuan yang baru mulai berwirausaha atau sudah mampu menjalankan usaha kerap mengalami berbagai problem, yaitu penipuan.

3. Manajemen bisnis

Sampai saat ini, mental perempuan dalam berbisnis belum setangguh pria. Selain itu pengalaman dalam bidang manajemen bisnis masih kalah dibanding pria. Para perempuan seringkali ragu dan bimbang ketika mengambil keputusan yang berhubungan dengan manajemen bisnis. "Namun, hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan pengalaman berbisnis dan melalui sekolah-sekolah formal," tukasnya.

4. Takut gagal

Dibandingkan pria, perempuan masih sering ketakutan untuk mengambil resiko besar dalam memulai bisnis, dan mengambil langkah untuk mengembangkan usahanya. "Rasa takut gagal dalam diri perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Hal ini disebabkan karena adanya banyak hal yang dipikirkan menyangkut ekonomi keluarga, dan anak-anak. Ini juga menjadi hambatan untuk berkembang" (Christina Andhika Setyanti, *Empat Kelemahan Perempuan Dalam Berbisnis*, Kompas. Desember 2011).

Jika di lihat secara sadar, kesetaraan gender di Kabupaten Karimun sebenarnya telah berjalan cukup baik. Dari dukungan keluarga dalam membebaskan bagi laki-laki dan perempuan dibidang pendidikan, ekonomi keluarga, serta peluang gerak untuk memainkan peran dalam masyarakat. Sebagai contoh, hampir tidak ada larangan dalam setiap keluarga bagi laki-laki atau perempuan untuk memperoleh pendidikan. Telah banyak orang tua yang berani melepas putra putri mereka untuk menuntut ilmu hingga ke perguruan tinggi. Dukungan ini di tunjukkan dengan pemenuhan fasilitas yang diperlukan dalam proses pendidikan. Begitu juga di bidang pemenuhan kebutuhan ekonomi, saat ini jarang sekali terlihat perempuan yang hanya duduk diam atau hanya beraktifitas dirumah. Masing-masing memperoleh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan diri mereka sendiri.

Begitu juga pemenuhan fasilitas pendukung oleh pemerintah Kabupaten Karimun di bidang Pendidikan. Sebagai contoh, pembangunan asrama bagi pelajar dan mahasiswa kabupaten karimun yang mengenyam pendidikan diluar kabupaten karimun.

Namun, berdasarkan pandangan penulis masih ada beberapa hal yang sangat perlu mendapat perhatian oleh pemerintah Kabupaten Karimun dalam peningkatan kesetaraan gender. Terutama untuk mengatasi atau paling tidak mencegah diskriminasi terhadap perempuan diantaranya adalah :

a) Citra baku/streetip

Yaitu pelebelan yang bersifat negatif terhadap jenis kelamin tertentu.

b) *Violance*

yaitu suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang, sehingga kekerasan tersebut tidak hanya menyangkut fisik (perkosaan, pemukulan), tetapi juga nonfisik (pelecehan seksual, ancaman, paksaan, yang bisa terjadi di tempat kerja, tempat-tempat umum)

c) Mengevaluasi hasil program pemberdayaan perempuan di bidang peningkatan produktivitas perempuan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.i. Kesimpulan

Dari seluruh pengamatan yang telah dilakukan mengenai permasalahan peningkatan kesetaraan gender oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Karimun penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Belum ada rencana kebijakan yang telah di rencanakan oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Karimun.
2. Beberapa kebijakan yang telah direncanakan antara lain adalah :
 - a. Membentuk Kelompok Kerja Analisis Gender di Kabupaten Karimun
 - b. Merencanakan Sosialisasi SKPD dengan merangkum seluruh instansi yang terkait dengan peningkatan aktivitas dan pencegahan diskriminasi terhadap perempuan.
3. Rencana kebijakan yang di rencanakan oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkendala oleh beberapa faktor, yaitu :
 - a. Belum disahkannya setiap perencanaan yang terkendala oleh minimnya dukungan pembiayaan lembaga legislatif Kabupaten Karimun
 - b. Pandangan budaya masyarakat

4. Untuk mengatasi kendala tersebut Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat usulan dana dan menjalankan beberapa program pemberdayaan perempuan yang telah di setujui
5. Dari segi pemberdayaan perempuan masih dapat dikatakan belum berhasil. Masih banyak permasalahan gender belum sepenuhnya terselesaikan. sebagai contoh, program peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui pembentukan kelompok perempuan pelaku usaha rumahan masih banyak di jumpai beberapa permasalahan, yaitu :
 - a. Pengelolaan modal oleh kelompok perempuan pelaku usaha rumahan
 - b. Kurangnya pengawasan dari Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengontrol aktivitas yang dilakukan oleh kelompok perempuan pelaku usaha rumahan.
6. Kemudian dalam permasalahan interaksi gender di Kabupaten Karimun masih banyak terjadi kasus-kasus yang menyudutkan perempuan terutama dalam pergaulan remaja. Kasus-kasus semacam ini sepertinya belum sepenuhnya tersentuh.

VI.ii. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya memperhatikan lembaga atau bagian yang terkait untuk mengetahui bagaimana hasil yang telah dicapai dengan adanya kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan tentang kesetaraan gender di Kabupaten Karimun.

2. Bagi lembaga legislatif hendaknya memperhatikan pendanaan yang peka gender dan menjalin kerjasama yang kongkrit terhadap instansi/badan/bagian yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Karimun yang menjalankan tugas untuk melaksanakan program pengarusutamaan gender di Kabupaten Karimun
3. Bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hendaknya melakukan analisa gender dengan metode-metode yang lebih akurat, agar mengetahui lebih luas apa sebenarnya yang menjadi permasalahan gender sesungguhnya. Sehingga, prgogram serta kebijakan yang dibuat dapat lebih menyentuh kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan gender dengan lebih efektif dan efesian.
4. Memotivasi setiap sub bagian yang ada di Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengusulkan dan melakukan ide-ide peningkatan kesetaraan gender di Kbupaten Karimun sesuai dengan tugas dan fungsinya masing. Dengan tujuan setiap bagian dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga kesetaraan gender dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSATAKA

- Bungin, Burhan. 2008. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : P.T. RajaGrafindo Persada
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fromm, Erich. 2011. *Cinta, Seksualitas, dan Matriarki : Kajian Komprehensif Tentang Gender*. Sumber Penerjemahan Bahasa : *Love, Sexuality and Maatriarchy about gender (1997)*. Yogyakarta : Jalasutra.
- Sahaludin, Henri. 2010. *Paham Kesetaraan Gender Dalam Studi Islam*,
Gugustugastrafficking.org
- Laki, Marius Agustinus. 2011. *Analisis Proses PenerapanPerhitungan dan Pelaporan Pajak Reklame Pada Kantor Dinas Pendapatan (DISPENDA) Kota Makasar*, Makasar : Universitas Hasanuddin
- Munandar, Aris. 2002. *Pembangunan Nasional, Keadilan Sosial, Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Universitas Paramidana Vol. 2 No. 1.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaanya di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Adminstrasi Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Usmara, A. 2002. *Paradigma Baru Manajemen Sumberdaya Manusia*, Amara books : Jakarta.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta : Paramadina.
- Setyanti, Christina Andhika. *Empat Kelemahan Perempuan Dalam Beribisnis*, Kompas Online. (Diakses : 20 Desember 2011)
- Setiawati, 2008. *Dialog : Menjadi Perempuan Yang Revolutioner*, www.muhammadiyahonline.com (Diakses : 20 Desember 2011)
- Sudarta, Wayan. *Konsep Gender dan Pengarusutamaan Gender*. Potable Document Format 18 halaman.

Mulia, Siti Musdah. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta : Gradedia Pustaka Utama.

Sajogyo, P. 1984. *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Ekonomi*. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : LPS-STKS

Lips, Hilary M. 1993. *Sex and Gender : An Introduction*. London: Myfield Publishing Company

Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia.

Sugiyono, 2001 dan 2005, *Metodelogi Penelitian*, CV. Alfa Beta, Bandung

Zaman, Badrus. 2009. *Partispasi Politik Perempuan Jawa Timur*. Surabaya :Yayasan Cakrawala Timur.pdf

<http://www.undp.or.id/pubs/docs/LetSpeakOutforMDGsID.pdf>

Undang-Undang :

INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

SK Menteri Dalam Negeri. Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah No. 132 Tahun 2003.

Keputusan Bupati Karimun No. 6 Tahun 2010.

Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Dearah.
www.menegpp.go.id (Diakses : agustus 2011)